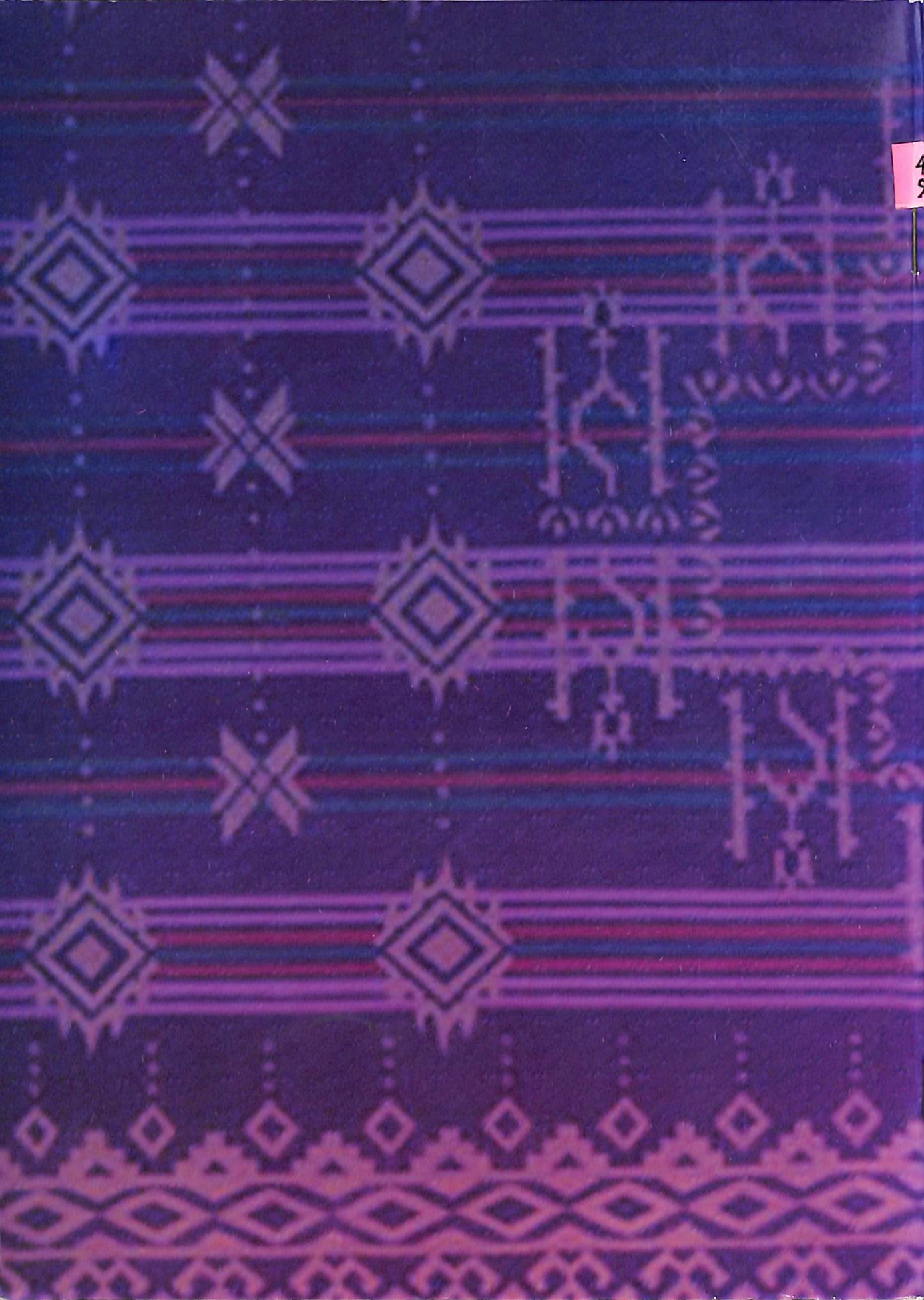


Buletin

# H a b a



*Kapita Selekta Sejarah dan Budaya*



# H a b a

Informasi Kesejarahan  
dan Kenilaitradisional

No. 49 Th. VIII  
Edisi Oktober – Desember 2008

## PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film  
Direktur Tradisi  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

## PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

## DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned  
Rusdi Sufi  
Aslam Nur

## REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional  
(Agus Budi Wibowo)  
Agung Suryo S  
Piet Rusdi

## SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha  
Bendaharawan  
Yulhaznis  
Netti Darmi  
Lizar Andrian

## ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh  
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651) 23226  
Email : bpsntbandaaceh@yahoo.com  
Website : www.bksntbandaaceh.info

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai  
Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

### Info Budaya

Buleun Aceh

### Wacana

Sudirman

Dari Partai Nasional hingga Partai Lokal : Tantangan Menuju Perubahan Politik dan Menjaga Perdamaian di Aceh

Dyah Hidayati

Rumah Adat Karo Refleksi Struktur Pemerintahan Yang Berbasis Demokrasi Kekeluargaan

Hasbulah

Dari "Teumon" Sampai "Ureung Aceh" : Sejarah Keberadaan Orang Nias di Aceh

Piet Rusdi

Sistem Kekerabatan dan Kehidupan Orang Cina (Khek/Hakka) di Banda Aceh

Harvina

Tjong A Fie : Philantropi Tionghoa di Medan

Essi Hermaliza

"Hutagalung" dan Sibolga

Iskandar EP

Upaya Pelestarian Gondang Sabangunan

### Pustaka

Pariwisata : Pengetahuan, Perilaku, dan Sikap Masyarakat

### Cerita

### Terjadi Dini Tinggi Raja

### Cover

Tema Haba No. 50 Kapita Selektta Sejarah dan Budaya

## PENGANTAR

# *Redaksi*

Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara merupakan salah dua diantara daerah di Nusantara yang menyimpan potensi social budaya. Potensi sosial budaya ini tidak akan terungkap apabila tidak ditulis. Untuk itu, Buletin Haba kali ini merangkum beberapa tulisan yang membahas tentang sosial budaya masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Pengungkapan potensi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai lapisan masyarakat.

Bermula dari tulisan yang sedang menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat di Aceh, yaitu masalah Partai Lokal. Partai lokal lahir setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan baru diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Tulisan yang ada di Haba terus mengalir pada aspek lain, seperti masalah demokrasi, biografi, seni, hingga pelestarian budaya.

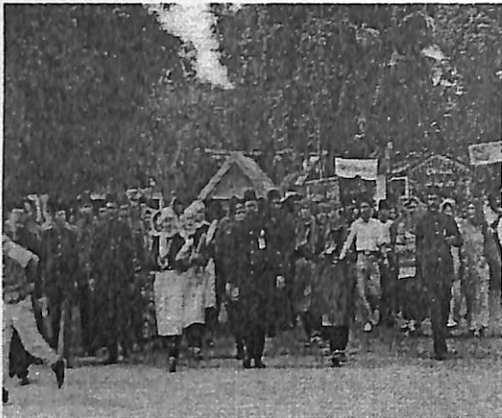
Kami berharap semua tulisan yang dirangkum dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada pembaca sehingga kita semakin arif dalam melihat permasalahan-permasalahan sejarah dan budaya yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. (Abw)

Redaksi

# BUELEUN ACEH

Masyarakat Aceh mempergunakan juga nama bulan orang Islam untuk sesuatu keperluan. Nama bulan ini diganti mereka dengan bahasa Aceh, yaitu :

1. Muharram di sebut *Asan Usen*
2. Safar disebut *Sapha*
3. Rabiul Awal disebut *Moklot*
4. Rabiul Akhir disebut *Adoe moklot* atau *Moklot teungoh*
5. Jumaidil Awal disebut *Moklot Keuneuleh*
6. Jumaidil Akhir disebut *Kanuri boh kayee*
7. Rajab disebut *Kanuri Apam*
8. Syahban disebut *Kanuri Bu*
9. Ramadhan disebut *Puasa*
10. Syawal disebut *Uroe Raya*
11. Zulkaidah disebut *Mapet* atau *Meu apet*
12. Zulhijjah disebut *Haji*



**Kemeriahan Maulid Akbar di Banda Aceh  
(Foto: Koleksi H.Harun Keuchik Leumik)**

Banyaknya hari dari masing-masing bulan Aceh itu adalah serupa dengan bulan Islam, sementara tahun orang Aceh adalah tahun hijrah juga. Bulan *Sapha* dianggap orang Aceh dahulu sebagai bulan sial,

sehingga sesuatu pekerjaan penting, istimewa yang berkenaan dengan urusan rumah tangga, jika tidak terpaksa tidak dilaksanakan orang dalam bulan tersebut. Sial itu dibuang ke laut dengan jalan mandi-mandi laut pada hari *reboo* terakhir dari bulan *Sapha* itu. Perbuatan ini telah menjadi suatu kebiasaan di Aceh. Sebelum *rebo* terakhir itu tiba, banyak orang-orang dari pedalaman turun dan menginap pada ahli warisnya (sanak saudara) yang tinggal berdekatan dengan kawasan tepi laut. Pada hari *Rebo* terakhir itu yang disebut "*Raboe Habeh*" mereka bersama-sama dengan ahli warisnya pergi mandi-mandi ke laut. Mereka membawa sekurang-kurangnya nasi dan buah-buahan untuk dimakan di tepi laut tempat mereka mandi.

Bukan tak ada pula yang menyembelih kambing ditempat permandian itu untuk dimakan bersama-sama. Mereka mandi dengan sepuas-puasnya dilaut dan ada yang sembahyang zuhur ditempat itu. Biasanya sesudah "*reubah leuho*" (akhir zuhur) mereka pulang ke tempat tinggalnya masing-masing.

Pada tanggal 10 dari bulan *Asan Usen* orang Aceh dulu berkabung untuk memperingati ulang tahun meninggalnya cucu Rasulullah yang bernama Saiyidina Husen yang meninggal dunia dalam suatu peperangan di Tanah Arab. Ditempat-tempat tertentu pada hari tersebut wanita-wanita Aceh memasak bubur yang dinamai "*kanuri asyura*" yang terdiri dari beras dan berbagai buah-buahan. *Kanuri* ini disajikan kepada orang-orang yang melewati tempat-tempat itu. (PR)

## Dari Partai Nasional Hingga Partai Lokal : Tantangan Menuju Perubahan Politik dan Menjaga Perdamaian di Aceh

**Oleh : Sudirman**

### Pendahuluan

Partai lokal adalah yang pertama kali ada di Indonesia, Aceh tetap saja sebagai pemula. Sama kala menyumbangkan pesawat angkasa sampai kemudian mencetuskan sebuah gagasan independen untuk berlaga menjadi pemimpin. Kali ini Aceh mulai lagi mendobrak yang selama ini mustahil ; partai lokal secara legal berlaku di daerah yang pernah berlumuran darah, istimewa dan khusus. Sekilas perjalanan pesta demokrasi di Aceh dari masa ke masa hingga munculnya partai lokal.

### Partai Politik Nasional

Pemilu 1955, diikuti 48 partai politik. Kekuatan partai-partai bercorak Islam dalam Pemilu pertama di Aceh sangat menonjol. Fakta menunjukkan, mayoritas pemilih pada saat pemilu 1955 diikuti oleh 546.379 pemilih lebih mempercayakan aspirasi politik mereka kepada partai-partai Islam seperti Masyumi dan Perti. Pada Pemilu 1955 perolehan suara partai-partai Islam jika dikalkulasi mencapai 90 persen. Proporsi yang demikian itu menempatkan Aceh sebagai salah satu kantong kekuatan partai Islam terbesar di tanah air. Sementara partai politik yang mengusung ideologi nasionalis, komunis, dan sosialis menjadi tidak berdaya di Aceh. Dari 48 partai politik maupun calon perorangan peserta pemilu, Masyumi menjadi pemenang mutlak. Sedikitnya tiga perempat (75,6 persen) suara diperoleh. Dari tujuh kabupaten/kota, dominasi Masyumi tampak di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tengah dan Aceh Barat, sedangkan di Aceh Selatan dimenangkan oleh partai Perti sekaligus menjadi urutan kedua dengan perolehan suara 13,6 persen.

Perolehan suara Masyumi dan Perti

di Aceh tidak banyak menyisakan peluang bagi partai bercorak Islam lainnya. Partai Nahdatul Ulama (NU) yang secara nasional memiliki pengaruh besar, di Aceh hanya mampu mengumpulkan 4. 769 suara atau di bawah satu persen. Dengan perolehan tersebut, partai itu menempati urutan keenam. Demikian juga Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) hanya mampu menempati urutan kedelapan.

Besarnya perolehan suara partai berredologi Islam dengan sendirinya mengubur harapan partai berbasis ideologi non agama. Partai Nasional Indonesia (PNI) maupun Partai Komunis Indonesia (PKI), dua partai yang saling berebut pengaruh di sebagian besar provinsi tanpaknya di Aceh tidak mampu berbuat banyak. PNI, misalnya, hanya mengumpulkan 3,3 persen suara. PKI bahkan hanya mampu meraih 1,4 persen saja. Proporsi yang diraih PKI masih di bawah perolehan suara Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang mampu menempati urutan keempat dengan porsi 1,6 persen suara. Kondisi lebih tidak beruntung terjadi pada calon-calon perorangan. Di Aceh tidak satu pun tokoh perorangan meraih simpati masyarakat. Nama-nama seperti T. Sjahrul Amani, Zentrato Taharo Taungoi, Daulay Baginda Kalidjungdung dan beberapa nama lainnya hanya mampu mengumpulkan puluhan orang pemilih.<sup>1</sup>

Pemilu periode 1971-1997, diikuti oleh tiga partai politik, karena partai politik benuansa Islam berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekalipun menghadapi kekuatan Golongan Karya (Golkar) sebagai kekuatan politik yang didukung oleh penguasa Orde Baru, para

<sup>1</sup> *Harian Kompas*, Kamis, 29 Januari 2004, hlm. 32.

## Wacana

pemilih partai-partai Islam yang semenjak Pemilu 1955 mendominasi perolehan suara, masih menunjukkan geliatnya pada beberapa pemilu berikutnya. Pemilu 1971, Golkar memang tampil menjadi pemenang. Dengan mengumpulkan 483.103 suara (49,7). Meskipun unggul sebenarnya jumlah tersebut terpaut tipis dengan perolehan suara partai-partai politik berideologi Islam yang berfusi menjadi PPP di tahun 1973--dan mampu meraih 48,9 persen suara.

Kekalahan perolehan suara pada tahun 1971 tidak menyurutkan semangat pendukung partai bercorak Islam. Hal itu terbukti, pada pemilu 1977 dan 1982, Aceh kembali dikuasai oleh partai-partai dimaksud. Pemilu 1977, misalnya, PPP mampu menjadi pemenang. Tidak kurang 57,5 persen suara diraih. Dengan proporsi tersebut, enam dari sepuluh kursi legislatif milik PPP. Golkar saat itu hanya meraih 41,3 persen suara atau hanya menguasai empat kursi. Kemenangan PPP dibuktikan pula pada saat Pemilu 1982. Sekalipun dibandingkan Pemilu sebelumnya suara yang dikumpulkan agak menurun namun PPP masih unggul (54,3 persen) dengan mendapatkan 15 kursi, Golkar 12 kursi, dan PDI 1 kursi.

Kemenangan PPP tidak bertahan lama. Pemilu berikutnya, 1987-1997 kembali Golkar berjaya. Pemberlakuan daerah operasi militer juga tampaknya semakin memuluskan penguasaan Aceh oleh Golkar pada waktu itu. Dari 10 kabupaten/kota di Aceh, Golkar menguasai lebih separuhnya. Beberapa kabupaten yang sebelumnya menjadi basis kekuatan PPP mulai meluntur, tergantikan oleh kekuatan Golkar. Pada pemilu 1987, misalnya, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, yang sebelumnya dikuasai oleh PPP menjadi wilayah Golkar. Begitupun pada pemilu 1992, bahkan pada pemilu 1997 tidak hanya di wilayah tersebut, pengaruh Golkar hingga ke Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. Hanya di Kabupaten Aceh Besar satu-satunya yang tetap dikuasai PPP.

Pada pemilu 1987 dan 1997, Golkar memperlihatkan keperkasaannya. Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA. yang ketika itu

menjabat Gubernur Aceh memang "habis-habisan" untuk memberi jalan kemenangan Golkar. Pada era itulah Golkar yang paling prestisius di Aceh. Cengkraman akar beringin terlalu kuat, sehingga nyaris tidak ada peluang lagi bagi kekuatan partai lain untuk bermain di Aceh. Ini seiring dengan kebijakan Golkar secara nasional yang ingin menempatkan diri sebagai mayoritas tunggal di Indonesia. Sebenarnya, di antara sengitnya persaingan antara Golkar dan PPP, PDI sempat menguasai satu kabupaten. Kota Sabang, yang semenjak pemilu sebelumnya milik Golkar, pada pemilu 1987 mampu dikuasai PDI. Hanya, penguasaan itu tidak berlangsung selamanya, pada pemilu 1997 kembali dikuasai Golkar.

Pada Pemilu 1987, PPP mendapatkan 15 kursi, Golkar 19 kursi dan PDI 2 kursi. Pemilu 1992, PPP mendapatkan 12 kursi, Golkar 21 kursi dan PDI 3 kursi. Sedangkan pemilu 1997, PPP mendapatkan 11 kursi, Golkar 23 kursi dan PDI 1 kursi. Runtuhnya rizim Orde Baru, menyebabkan dominasi Golkar menjadi surut. Keadaan perpolitikan tersebut menyebabkan kembali kekuatan politik partai-partai berbasis massa Islam di Aceh. PPP, merupakan partai politik yang paling banyak mendapatkan keuntungan atas perubahan tersebut. Pada pemilu 1999, PPP yang kembali mengubah asas partainya dari Pancasila menjadi partai berasas Islam tampil sebagai pemenang. Partai ini mampu mengumpulkan 28,8 persen suara. Munculnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang banyak didukung oleh tokoh Muhammadiyah semakin melengkapi kekuatan partai-partai politik yang mengandalkan massa Islam di Aceh. Pada pemilu kali ini, PAN merebut 17,9 persen suara. Dengan proporsi tersebut, partai ini menempati urutan kedua perolehan suara.

Aceh memang bukan milik partai-partai berideologi nasionalis. Dari 10 besar peraih suara, hanya tiga partai bercorak nasionalis yang tampil yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Dari segi perolehan suara pun kiprah partai-partai bercorak nasionalis itu tidak terlalu dominan. Tampaknya pemilu

1997 merupakan kulminasi kemenangan Golkar di Aceh. Pada pemilu 1997 Golkar meraih 64,8 persen suara, pada pemilu 1999 merosot, tinggal 15,6 persen. Kendati demikian, Kota Sabang, Aceh Utara dan Aceh Tenggara masih dikuasai Partai Golkar. Di Kabupaten Aceh Utara kemenangan Golkar lebih dikarenakan tidak dapat diadakan pemilu secara dan demokratis sebab gangguan keamanan.

PDI Perjuangan pun tidak dapat banyak berkutik di Aceh. Apabila secara nasional partai ini mampu memenangkan pertarungan perolehan suara, di Aceh hanya Kabupaten Aceh Timur yang berhasil dimenangkan. Proporsi yang diraih di wilayah ini pun tidak terpaut banyak dengan perolehan suara Partai Golkar. Jika PDIP meraih 27,8 persen suara, Partai Golkar mampu mengumpulkan 22,6 persen. Selain PPP dan partai-partai bernuansa Islam lainnya seperti Partai Bulan Bintang, Partai Nahdatul Umat, Partai Keadilan, Partai Persatuan dan Partai Abul Yatama juga mendapat simpati masyarakat Aceh. Proporsi yang diraih kelima partai tersebut memang masih tergolong kecil, di bawah lima persen. Namun, keberadaan mereka semakin melengkapi kejayaan partai-partai berideologi Islam di Aceh.<sup>2</sup>

Pemilu 2004, untuk pertama kali dalam sejarah politik Indonesia termasuk Aceh, dibuka kemungkinan pemungutan suara dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pertama, pada hari Senin, 5 April 2004, pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak.

Kedua, pada tanggal 5 Juli 2004 akan diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Ketiga, apabila pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tanggal 5 Juli belum dapat ditetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih karena tidak ada pasangan calon presiden yang dapat meraih

suara di atas 50 % maka pemungutan suara putaran kedua akan digelar pada tanggal 20 September 2004.

Pemilu 2004 di Aceh diikuti oleh 24 partai politik. Pelaksanaan pemilu 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat berbeda sikap masyarakat dengan pemilu 1999. Pada pemilu 1999 banyak elemen masyarakat yang menolak Pemilu di Aceh, Namun, pada pemilu tahun 2004 hampir tidak ada elemen masyarakat yang menolak pelaksanaan pemilu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kecuali dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Hal itu mungkin karena masyarakat trauma dengan keadaan dan situasi yang sedang berkembang di Aceh.

Secara umum pelaksanaan pemilu 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjalan lancar dan aman, walaupun ada beberapa persoalan yang muncul, seperti gangguan keamanan oleh GAM, ijazah palsu, isu calon legislatif perempuan, masalah pemilihan yang buta huruf, kecurangan dalam perhitungan suara, kampanye di luar jadwal, manipulasi biodata caleg, politik uang dan sebagainya. Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam beberapa daerah pemilihan. Daerah pemilihan anggota DPRD kab./kota se-Nanggroe Aceh Darussalam pada pemilu 2004, terdiri atas 20 daerah pemilihan dengan memperebutkan 555 kursi. Untuk daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam delapan wilayah pemilihan dengan memperebutkan 69 kursi. Sedangkan untuk anggota DPR-RI dibagi dalam dua wilayah pemilihan dengan memperebutkan 13 kursi.<sup>3</sup>

Pada Pemilu 2004, pola dukungan serupa seperti pada pemilu sebelumnya masih terjadi di Aceh. Dari 69 kursi DPRD NAD yang diperebutkan oleh 24 kontestan peserta pemilu, hanya 11 partai politik yang mendapat kursi di DPRD NAD. Kesebelas partai politik itu adalah PPP 12 kursi, PBB 8 Kursi, Partai Demokrat 6 kursi, PKPI 1 kursi, PNUI 2 kursi, PAN 9 kursi, PKB 1 kursi, PKS 8 kursi, PBR 8 kursi, PDIP 2 kursi,

<sup>3</sup> *Tabloid Berita Kontras*, No. 269, Tahun VI, 4-10 Desember 2003.

<sup>2</sup> *Ibid.*,



## Wacana

Partai Golkar 12 kursi.<sup>4</sup>

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang terpilih ialah Drs. H.A. Malik Raden, M.M., Helmi Mahera Almujaheed, Adnan NS, serta Mediati Hafni Hanum, dari 27 orang yang ikut mencalonkan diri pada pemilu 2004.

### Partai Politik Lokal

Pemilu legislatif 2009 di Aceh akan berbeda dengan daerah lain. Untuk pertama kalinya, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemilu akan diikuti partai politik lokal yang memperebutkan kursi di parlemen Aceh. Kesempatan itu tidak datang serta merta, lewat sebuah jalan panjang sebagai bagian dari kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada tanggal 15 Agustus 2005. Dalam MoU Helsinki, pada angka 1.2 tentang partisipasi politik, tertera partai lokal.

Ide mendirikan partai lokal sudah lama berembus, pada tahun 2002 Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPRA) mengadakan kongres luar biasa. Mereka melihat rakyat Aceh sudah membutuhkan alat perjuangan politik, bukan lagi sebatas kritikan. Peserta kongres membulatkan tekad mendirikan partai politik. Namun, belum sempat ide itu direalisasikan, kondisi politik Aceh berubah. Pada tanggal 19 Mei 2003, perdamaian yang dirintis oleh Yayasan Henry Dunant Center gagal. Lantas diterapkan status Darurat Militer di Aceh sehingga maksud tersebut gagal.

Kondisi itu berlanjut hingga 15 Agustus 2005, setelah Indonesia dan GAM menandatangani Kesepakatan Damai Helsinki, situasi politik di Aceh berubah lagi. Kondisi itu dimanfaatkan oleh aktivis FDRA untuk menggelar kongres di Saree, Aceh Besar, pada 27 Februari 2006. Pada kongres itu, ide pembentukan partai lokal semakin menguat.<sup>5</sup> Tidak mengherankan, kelompok

ini yang pertama mendeklarasikan berdirinya partai lokal di Aceh.

Dalam amanat MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kehadiran partai lokal dibenarkan untuk Aceh. Dalam klausul MoU disebutkan bahwa Aceh memiliki dua hak penting. Pertama, Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung) Prov. NAD. Kedua, pemberian izin membentuk partai lokal. Pembentukan partai lokal juga tertuang dalam UU No. 11/2006 dan PP No. 20/2007. Tentang partai lokal disebutkan : (1) Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (2) Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Sementara tujuan umum partai politik lokal (parlok) disebutkan dalam pasal 78 berbunyi : mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 ; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.<sup>6</sup>

Setelah itu, bermunculan partai-partai lokal yang berbasis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada mulanya terdapat 12 partai lokal yang muncul di Aceh dan mendaftar ke Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diverifikasi sesuai aturan UU-PA dan PP Partai Lokal. Sekitar 12 partai lokal, mendaftar untuk menjadi calon peserta pemilu 2009. Hasil verifikasi partai lokal yang diumumkan pada tanggal 27 Juni 2008, sepuluh dari dua belas partai lokal dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Pada tanggal 7 Juli 2008, dari sepuluh partai lokal yang diverifikasi faktual, hanya enam partai lokal yang lulus,

<sup>4</sup> *Harian Serambi Indonesia*, Kamis 29 April 2004.

<sup>5</sup> *Aceh Magazine*, Februari 2008, hlm. 10.

<sup>6</sup> UU No. 11/2006, pasal 77 & 78.

sedangkan empat lainnya dinyatakan gugur. Keenam partai lokal yang dinyatakan lulus verifikasi faktual dan berhak mengikuti pemilu 2009 adalah Partai Rakyat Aceh (PRA), dengan susunan pengurus ketua, Ridwan H Mukhtar, Sekretaris, Thamren, Bendahara, Malahayati, Partai Aceh (PA), ketua, Muzakkir Manaf, mantan panglima perang Gerakan Aceh Merdeka, Sekretaris, Jahja Teuku Mu'ad, Bendahara, Muhammad Dahlan. Partai Daulat Atjeh (PDA), ketua, Nurkalis MY, Sekretaris, Teungku Muliadi, S. Pd., bendahara Teungku Amiruddahri. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Ketua, Drs. H. Ghazali Abbas Adan, Sekretaris, Drs. H. Husni Hamid, bendahara, H.M. Hasan Saleh. Partai Bersatu Aceh (PBA), ketua, Ahmad Farhan Hamid, Sekretaris, Muhammad Saleh, S.E., bendahara, H. Ridwan Yunus, S.E. Partai Suara Independen (SIRA), ketua, Muhammad Taufik Abda, Sekretaris, Arhama, bendahara, Faurizal Moechtar, S.T.<sup>7</sup>

#### Penutup

Memperhatikan perolehan suara pemilu semenjak tahun 1955 hingga tahun 1999, menunjukkan betapa loyalnya masyarakat di Aceh terhadap partai-partai yang menggunakan simbol keislaman. Memang, ada pula masa penurunan dukungan, sejalan dengan semakin kuatnya penguasaan rezim Orde Baru. Partai Golkar, sebagai kekuatan politik yang dibentuk dan didukung penguasa saat itu sempat berjaya. Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung dalam satu dasawarsa dan kemudian berbalik kembali bersamaan dengan keruntuhan rezim. Kehadiran Partai lokal di Aceh telah memberi secercah harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Bukti itu dapat dilihat dari banyaknya partai lokal yang mendaftar ke Depkum dan HAM Aceh.

Kehadiran partai lokal di Aceh dapat dikatakan sebagai efek dari euforia politik yang berlangsung di Aceh. Semua itu bertujuan memberi harapan perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Keberadaan partai lokal harus dilihat sebagai : mengembalikan fungsi kedaulatan kepada rakyat Aceh demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Membangun sistem pemerintahan Aceh yang bersifat *self government*, yang dikelola secara partisipatif, transparan, dan demokratis. Membangun dan merawat perdamaian yang dijadikan pertimbangan utama dalam semua keputusan politik.

Jaminan terhadap sebuah perubahan secara fundamental tentu terlalu berlebihan. Namun, setidaknya, kehadiran partai lokal di Aceh harus dimaknai sebagai sebuah proses berdemokrasi. Kehadiran partai lokal di Aceh belum menjamin lahirnya sebuah iklim demokrasi yang santun untuk Aceh masa depan. Sebab, semua itu sangat tergantung pada tujuan, niat dan kerja partai lokal itu sendiri. Keinginan perubahan ke arah lebih baik yang diusung setiap partai lokal, setidaknya, dapat dijadikan semangat baru, menuju Aceh baru. Sebuah tantangan besar yang akan dihadapi bersama oleh rakyat Aceh, khususnya politisi Aceh, setelah hak mendirikan partai politik di tingkat lokal menjadi salah satu substansi penting yang telah dituangkan dalam Fakta Perdamaian Helsinki antara RI dan GAM. Yakni, bagaimana rakyat Aceh mampu memanfaatkan partai politik lokal sebagai wahana penyelesaian konflik, sekaligus menjadi perangkat suprastruktur politik dalam upaya membangun dan merawat perdamaian.

---

<sup>7</sup>Tabloid Modus Aceh, No. 13/TH. VI Minggu III, Juli 2008, hlm. 9, dan No. 46/TH. V Minggu I, Maret 2008, hlm. 9-10.

## Rumah Adat Karo Refleksi Struktur Pemerintahan Yang Berbasis Demokrasi Kekeluargaan

Oleh : Dyah Hidayati

### Geografis Kabupaten Tanah Karo

Daerah Karo sebelum adanya campur tangan kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan wilayah sangat luas yang dihuni oleh Etnis Karo. Seperti yang dikemukakan oleh J. H. Neumann bahwa wilayah yang dihuni oleh Suku Karo dibatasi oleh jalan yang memisahkan dataran tinggi dari Deli Serdang. Di sebelah selatan wilayahnya kira-kira dibatasi oleh Sungai Biang (Sungai Wampu), di sebelah barat dibatasi oleh Gunung Sinabung, dan sebelah utara meluas ke dataran rendah Deli Serdang. Saat ini wilayah Kabupaten Tanah Karo berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Dairi, Tobasa, Simalungun, dan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Secara astronomis kabupaten ini berada antara 2° 50' - 3° 19' Lintang Utara dan 97° 55' - 98° 38' Bujur Timur, dengan areal seluas 2.127.25 km<sup>2</sup>, berketinggian 120 m - 1600 m di atas permukaan laut.<sup>1</sup>

### Sejarah Etnis Karo

Etimologi Suku Bangsa Karo dihubungkan dengan nama Haru yang kemudian berubah menjadi Haro, dan selanjutnya menjadi Karo. Sedangkan sumber lain menyatakan Karo berasal dari kata Karau, Harau, Aru, atau Haru.<sup>2</sup> Haru sendiri diyakini sebagai kerajaan tertua yang pernah berdiri dan jaya di Tanah Karo sebelum terjadinya ekspansi oleh Kesultanan Aceh. Sejarah Suku Bangsa Karo memang tak dapat dipisahkan dari keberadaan

Kerajaan Haru yang kelak di kemudian hari dihubungkan dengan Putri Hijau yang melegenda di Kawasan Deli Tua. Nama Haru juga disebut-sebut dalam Kitab Negara Krtagama gubahan Mpu Prapanca yang menceritakan tentang penaklukan Majapahit dengan patihnya Gajah Mada terhadap Negeri Haru di Sumatera.

Menurut yang dikemukakan oleh P. Tamboen, Suku Bangsa Karo adalah salah satu cabang dari lima Batak yang terdiri dari Karo, Toba, Angkola, Pakpak, dan Mandailing. Satu sama lain memiliki persamaan tulisan, bahasa, dan adat-istiadat, sehingga ada kemungkinan bahwa mereka berasal dari rumpun bangsa yang sama. Keturunan Karo disebut *meherga* atau *merga*, artinya berharga dan berkuasa. *Meherga* menurunkan lima keturunan yaitu Perangin-angin, Karo-karo, Ginting, Sembiring, dan Tarigan, yang masing-masing berketurunan dan berkembang menjadi cabang-cabang.<sup>3</sup> Dengan demikian setiap orang Karo memiliki salah satu dari lima induk *merga* tersebut.

### Rumah Adat, Sistem Keekerabatan, dan Organisasi Pemerintahan Suku Bangsa Karo

Masyarakat Karo terikat oleh adat-istiadat yang berlandaskan *daliken sitelu* (*daliken* = tungku, *telu* = tiga) yang artinya sama dengan *sangkep sitelu* atau *rakut sitelu*. *Daliken sitelu* terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Senina*, yaitu kelompok atau golongan saudara laki-laki semerga
2. *Anak Beru*, yaitu kelompok yang mengambil anak perempuan

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, *Kabupaten Karo dalam Angka 2003* (Kabanjahe : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo dan Kantor Pengolahan Data Kabupaten Karo, 2004).

<sup>2</sup> Brahma Putro, *Karo dari Zaman ke Zaman Jilid I*, (Medan : Penerbit Ulih Saber, 1979), hlm 39.

<sup>3</sup> P. Tamboen, *Adat Istiadat Karo*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1952), hlm 19.

3. *Kalimbubu*, yaitu kelompok yang memberikan anak perempuan.

Sedangkan pertalian kekerabatan masyarakat Karo adalah sebagai berikut :

1. *Sembuyak*, yaitu saudara kandung
2. *Senina*, yaitu *sada ninina* yang berarti saudara senenek
3. *Senina Sipemerren*, saudara karena pertautan ibu yang bersaudara
4. *Senina Siparibanen*, saudara karena pertautan istri yang bersaudara
5. *Anak Beru*, yaitu kelompok pengambil anak perempuan
6. *Anak Beru Menteri*, yaitu anak beru dari anak beru
7. *Kalimbubu*, yaitu kelompok pemberi anak perempuan
8. *Puang Kalimbubu*, yaitu kalimbubu dari kalimbubu

Selain diperoleh dari keturunan melalui perkawinan, pertalian kekerabatan pada masyarakat Karo juga dapat diperoleh dari proses perkenalan yang diistilahkan sebagai *ertutur*, yaitu cara perkenalan yang berpedoman pada merga untuk laki-laki dan beru untuk perempuan. Dari *ertutur*-lah dapat diketahui hubungan kekerabatan yang disebut *tutur siwaluh* seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu ada aturan untuk tidak saling berbicara atau pantang berbicara (*rebu*), antara lain antara suami anak perempuan (*kela*) dengan ibu istri (*mami*) atau antara sesama istri ipar (*turangku*). Pantangan tersebut dapat diartikan sebagai sikap positif, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan antara pihak-pihak yang dipantangkan.<sup>4</sup>

Selain itu Suku Bangsa Karo memiliki bangunan tradisionalnya sendiri, antara lain yang berfungsi sebagai hunian. Rumah adat Karo tak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang berlaku dalam

masyarakat. karena sebuah rumah dapat dihuni oleh beberapa kepala keluarga sekaligus yang masih berada dalam ikatan kekerabatan yang dekat. Hal itu tentu saja memerlukan pengaturan khusus agar tetap terbina kerukunan di antara penghuni rumah. Di jaman sekarang hal itu tentulah sangat sulit karena dengan demikian masing-masing penghuni rumah otomatis kehilangan sebagian *privacy*-nya dan saling menyesuaikan kepentingan masing-masing.

Rumah adat Karo telah mulai ada sebelum abad XV Masehi. Konstruksinya dipengaruhi oleh langgam Tamil Nado.<sup>5</sup> Secara umum rumah adat Karo merupakan rumah panggung dengan penyangga berupa tiang-tiang bulat yang berdiri di atas *palas* atau umpak batu. Lantai rumah berupa susunan papan, sedangkan dinding tersusun dari papan-papan yang dipasang vertikal dan dilengkapi dengan beberapa buah jendela. Antara papan-papan dinding diikat dengan tali yang dirangkai melilit dinding membentuk hiasan *ret-ret* atau motif cicak. Atap rumah dibuat dari ijuk dengan hiasan tanduk kerbau di bagian ujung atap. Tanduk kerbau tersebut secara filosofis melambangkan keberanian, kegagahan, dan kejujuran. Di bawah hiasan kerbau terdapat *ayo-ayo* yang terbuat dari anyaman bambu. Tiang sokoguru disebut *tunjuk langit*. sedangkan tiang penopang horizontal disebut *kite kucing*. Pintu rumah terdapat di bagian depan dan belakang.

Sebuah rumah adat Karo ditempati secara bersama-sama oleh 4, 8, hingga 12 kepala keluarga. Setiap keluarga menempati 1 ruangan, sedangkan sebuah tungku akan dipakai bersama-sama oleh 2 keluarga sekaligus. Antara satu ruang dengan ruang lainnya terbuka. Hanya tempat tidur yang dibatasi oleh papan, sebagai tempat paling pribadi bagi setiap keluarga yang tinggal di dalamnya. Rumah adat yang ditempati oleh 4 kepala keluarga disebut rumah adat 2 ruang atau 4 jabu, sedangkan yang ditempati oleh 8 kepala keluarga disebut rumah adat 4 ruang atau 8 jabu. Di dalam rumah adat Karo 4 ruang

<sup>4</sup> Lila Pelita Hati, "Sekilas tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Karo dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala Nomor 15/2005", (Medan : Balai Arkeologi Medan, 2005), hlm. 57-58.

<sup>5</sup> Brahma Putro. *op.cit.* hlm. 87

## Wacana

terdapat 8 jabu (tempat kepala keluarga), yaitu :

1. *Jabu Bena Kayu*, dinamakan *Jabu Pengelului* atau Pengulu yang dikepalai oleh Anak Taneh, yaitu yang berhak atas tanah adat;
2. *Jabu Ujung Kayu*, ditempati oleh Anak Beru yang berfungsi atau bertugas menjalankan perintah-perintah Pengulu sekaligus mewakili Pengulu;
3. *Jabu Lepar Bena Kayu*, dinamakan *Jabu Sungkun Berita* yang berarti menanyakan kabar berita. Ditempati oleh anak Pengulu yang berfungsi atau bertugas sebagai pengamat perkembangan situasi dan kondisi yang ada seperti terjadinya kekacauan, serangan musuh, dan lain-lain;
4. *Jabu Lepar Ujung Kayu*, dinamakan *Jabu Simangan-minem* yang berarti makan dan minum. Ditempati oleh *Kalimbubu*, yaitu pihak istri atau pihak ibu Pengulu yang berfungsi atau bertugas sebagai penasihat Pengulu. *Kalimbubu* sangat disegani oleh masyarakat Karo sehingga dianggap sebagai Tuhan Yang Nampak;
5. *Jabu Sidapurken Bena Kayu*, dinamakan *Jabu Peninggel-ninggel* yang berarti menyaksikan secermat-cermatnya. Ditempati oleh Anak Beru Menteri, yaitu yang mengawini adik perempuan dari Anak Beru Pengulu. Fungsi atau tugasnya adalah sebagai saksi dalam musyawarah-musyawarah adat;
6. *Jabu Sidapurken Ujung Kayu*, dinamakan *Jabu Arinteneng*, yaitu nama sebuah kain adat yang indah buatannya dan dijadikan sebagai kain Upah Tendi (Upah Roh) di samping sebagai perhiasan. Ditempati oleh Anak dari *Kalimbubu*;
7. *Jabu Sidapur Lepar Ujung Kayu*, dinamakan *Jabu Bicara Guru*. Bicara Guru adalah nama Dewa Roh yang Luhur, yaitu roh anak-anak kecil belum bergigi yang telah meninggal dunia. Ditempati oleh rohianiawan, yaitu Guru Agama atau Guru Sibaso;

8. *Jabu Sidapurken Lepar Bena Kayu*, dinamakan *Jabu Singkapuri Belo* yang berarti meramu sirih. Ditempati oleh anak dari Anak Beru yang bertugas untuk menerima tamu-tamu Pengulu.

Masing-masing penghuni Jabu juga diwajibkan secara bergiliran menjaga keamanan rumah dengan penuh tanggung jawab dan secara sukarela.<sup>6</sup>

Pengaturan yang diterapkan di rumah adat Karo merupakan gambaran kecil mengenai struktur pemerintahan Karo, yaitu dengan pembagian tugas/kewajiban dan wilayah yang jelas, namun tetap dalam keterbukaan. Seperti yang tampak pada rumah adat 8 jabu di mana setiap jabu ditempati oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam adat-istiadat setempat, dan ia mengemban tugas khusus di dalam batas wilayahnya masing-masing, dalam hal ini di dalam sebuah rumah yang dihuni secara bersama-sama sesuai dengan pembagian ruangnya. Lengkapnya unsur-unsur kerabat di dalam sebuah rumah adat Karo mencerminkan berfungsinya setiap unsur kekerabatan di dalam sistem pemerintahan adat terkecil di Karo. Dari pembagian tugas dan fungsi yang sangat lengkap dan tertata di setiap rumah adat Karo tampaklah bahwa rumah adat Karo merupakan dasar demokrasi berbasis kekeluargaan dalam pemerintahan adat Karo.

Masyarakat Karo juga sangat mematuhi adat-istiadatnya. Segala sesuatu yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama terlebih dahulu dimusyawarahkan. Musyawarah adat yaitu *runngu* dilaksanakan oleh lembaga musyawarah adat yang disebut *runngun*.

Sistem kekerabatan menjadi bagian terkecil namun sangat penting dari struktur pemerintahan masyarakat Karo. Desa pada awalnya juga merupakan pemerintahan adat yang sangat didukung oleh eratnya sistem kekerabatan yang ada. Pada awalnya sistem pemerintahan terkecil yang dikenal adalah *kesain*, yaitu kelompok pemukiman penduduk yang didirikan oleh *simantek* atau

<sup>6</sup> Brahma Putro, *op.cit.*, hlm 87-89

*bangsa taneh* dengan *anak beru* dan *senina*-nya. Pendirian sebuah desa menurut adat Karo tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang atau satu kelompok patrilineal saja tetapi harus bersama-sama dengan *anak beru* dan *senina* kelompok yang bersangkutan. *Kesain* dipimpin oleh seorang *pengulu kesain*, dan yang berhak menduduki jabatan tersebut adalah orang yang pertama mendirikan *kesain*. Karena meningkatnya jumlah keturunan yang berakibat semakin banyaknya jumlah penduduk, biasanya akan didirikan *kesain-kesain* yang baru yang merupakan pecahan dari *kesain* yang telah berdiri terlebih dahulu. Beberapa *kesain* pada akhirnya akan bersatu membentuk sebuah *kuta* yang dipimpin oleh seorang *pengulu kuta*. Gabungan dari beberapa *kuta* disebut *urung* dan dikepalai oleh seorang *pengulu urung* yang dijabat oleh *pengulu kuta* yang berdiri paling awal. *Pengulu urung* atau *raja urung* menjalankan tugasnya dibantu oleh para *pengulu kuta* dan untuk permusyawaratan dibentuklah *balai urung*.

*Jambur*, yaitu bangunan yang berfungsi sebagai lumbung padi, tempat tidur bagi *anak perana* (pemuda), dan tempat para tamu akan dibangun setelah berdirinya beberapa *kesain*. Bagian bawah *jambur* juga berfungsi sebagai tempat melakukan musyawarah peradilan oleh *pengulu* dengan *anak beru* dan *senina*-nya setiap tujuh hari sekali. *Jambur* atau *balai kuta* didirikan di *kesain* yang pertama kali berdiri dalam kelompok tersebut.

Secara umum tugas legislatif dan eksekutif baik pada *kesain*, *kuta*, maupun *urung* dilaksanakan oleh *pengulu*, *anak beru*, dan *senina*-nya, sedangkan pelaksanaan yudikatif dilakukan secara adat kekeluargaan dan musyawarah. Di sini *kalimbubu* memiliki peranan yang sangat besar dan penting, yaitu sebagai pihak yang melaksanakan peradilan.

Dalam sistem kekerabatan yang juga menjelma menjadi kesatuan organisasi pemerintahan terkecil tersebut *pengulu kesain* tidak melakukan segala urusan pemerintahan sendirian, namun dibantu beberapa unsur masyarakat yang memiliki fungsi dan jabatan khusus, antara lain *pande*

*parik* (ahli pengairan), *guru sibaso* (semacam orang pintar atau peramal), dukun yang pandai mengobati, *pande namura* (ahli bertukang), dan *sierjabaten* (seniman musik).<sup>7</sup>

Demokrasi berbasis kekeluargaan telah menjadi falsafah hidup masyarakat Karo sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan seorang pemimpin di Tanah Karo tidaklah dapat disebut sebagai golongan penguasa, terutama mengenai hak pemilikan tanah. Seorang pemimpin Suku Bangsa Karo pada umumnya tidak menguasai tanah yang lebih luas dari tanah milik rakyatnya walaupun mereka memiliki hak istimewa atas pembagian tanah.

Gotong royong atau *neraya* juga merupakan salah satu yang menonjol pada masyarakat Karo. Dalam mendirikan sebuah rumah adat, masyarakat bahu-membahu melaksanakannya, antara lain mengumpulkan bahan-bahan bangunan dari hutan hingga proses pembangunannya. Rumah adat Karo berukuran sangat besar sehingga dalam pembangunannya memerlukan tenaga yang sangat banyak. Hal itu hanya dapat terlaksana melalui *neraya*.<sup>8</sup>

Hingga saat ini di beberapa tempat masih terdapat rumah adat Karo yang tetap lestari dan masih dihuni, antara lain di Kecamatan Juhar, Barus Jahe, Tiga Panah, Kabanjahe, dan Simpang Empat.

### Penutup

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa garis keturunan dan hubungan perkawinan menurut adat adalah dasar dalam susunan politik dalam pemerintahan adat Karo. Tiga kedudukan yaitu *pengulu*, *anak beru*, dan *senina* adalah bagian dari ikatan kekerabatan yang juga menjadi kedudukan terpenting dalam sistem pemerintahan adat. Uniknya, baik *pengulu* maupun *anak beru* dapat berdomisili di satu rumah secara bersamaan dengan pembagian ruangan dan pembagian tugas kewajiban

<sup>7</sup> Lila Pelita Hati, *op.cit.*, hlm. 58-59

<sup>8</sup> Brahma Putro, *op.cit.*, hlm. 95-96

## **Wacana**

---

yang jelas dan tegas. Sebuah rumah adat Karo dapat ditempati oleh beberapa kepala keluarga sekaligus, yang menandakan eratnya persatuan dalam ikatan kekerabatan masyarakat Karo. Dari uraian di atas tampaklah bahwa ikatan kekerabatan yang terdapat di satu rumah mencerminkan organisasi pemerintahan yang mantap di Tanah Karo dari tingkat yang paling kecil, meningkat ke lingkup yang lebih besar.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari tulisan ini adalah bahwa struktur pemerintahan yang berbasis demokrasi kekeluargaan di Tanah Karo terefleksi dengan sangat jelas dari tata cara kehidupan di sebuah rumah adat Karo yang telah diatur oleh adat-istiadat yang mantap.

---

Dyah Hidayati, S.S adalah Tenaga Peneliti pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala  
Banda Aceh

---

## Dari “Teumon” Sampai “Ureung Aceh” : Sejarah Keberadaan Orang Nias di Aceh

Oleh : Hasbullah

### Pendahuluan

Trafiking atau perjual – belian manusia telah terjadi di nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Di Aceh kegiatan ini juga telah marak dilakukan di pesisir Barat – Selatan Aceh yang merupakan jalur pelayaran laut dan tujuan migrasi dari Sumatra Barat dan sebaliknya pada abad ke-17, 18 dan 19.<sup>1</sup> Pada periode selanjutnya setelah kondisi ekonomi berubah lebih baik dan bertambah banyak kegiatan pertanian dan perdagangan yang diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak untuk kegiatan produksi. Hal inilah yang mendukung terjadinya kegiatan trafiking dari Nias ke Aceh.

Di pelabuhan Susoh (sekarang menjadi salah satu kecamatan di pesisir Kabupaten Aceh Barat Daya), pada sekitar abad ke-18 telah ramai dengan aktivitas trafiking.<sup>2</sup> Pelabuhan Susoh adalah salah satu pelabuhan bagi perdagangan budak dari Nias. Dalam terminologi lokal, korban *trafficking* di Aceh sering diibaratkan seperti ungkapan *hadih maja*, “*namiet tan po ; tikoh tan pulo*”,<sup>3</sup>

artinya budak tanpa majikan ; tikus tanpa kepulauan. Maksudnya adalah perumpamaan terhadap nasib orang – orang tanpa *sarakata* atau silsilahnya yang jelas.

Di Aceh, budak atau tenaga kerja belian disebut dengan *teumon*. Keberadaan golongan *teumon* ini menurut catatan sejarah atau berdasarkan historiografi *nederlandosentris* memang telah diakui tentang keberadaan golongan tersebut di dalam masyarakat Aceh, tetapi jumlahnya sangat sedikit<sup>4</sup>, dibandingkan penduduk dari etnik lokal. Di sekitar Susoh saja pada waktu itu penduduk berjumlah 18.000 orang,<sup>5</sup> di antaranya terdapat *ureung Nieh*. Meskipun begitu lemah posisi mereka sebagai golongan *teumon*, namun tidak semuanya dapat diperlakukan dengan rendah dan semena-mena. Hal itu sesuai dengan pengakuan orang Aceh seperti yang tersirat dalam ungkapan *hadih maja* “*meuri-ri ija ta ikat pinggang ; meuri – ri dagang jeut ta peukra*”. Artinya tidak semua kain sebagai pengikat pinggang , tidak semua perantau dapat direndahkan.<sup>6</sup> Keberadaan *ureung Nieh* tetap memberikan warna menarik dalam perjalanan sejarah. Mereka yang terlahir dari keterpurukan kehidupan dan perekonomian di daerahnya terpaksa menjadi *teumon* di Aceh. Dalam perjalanan selanjutnya golongan *teumon* ini ternyata dapat memposisikan diri sejajar dengan masyarakat Aceh. Proses itu terjadi setelah mereka mengalami asimilasi dan pembauran dengan etnik-etnik lokal di Aceh sehingga akhirnya menjadi *ureung Aceh*.

<sup>1</sup> H. Zakaria Ahmad (ed.), *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom*, (Blangpidie : Pemda ABDYA, 2007). hlm.121-124

<sup>2</sup> Susoh adalah salah satu pelabuhan tradisional yang sampai saat ini masih eksis. Sekarang pelabuhan ini telah direhabilitasi dan direkonstruksi kembali untuk pelabuhan bongkar muat ikan dan barang, khususnya semen dari Padang, Sumatra Barat. Pelabuhan ini terletak di daerah Ujong Serangga di kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Susoh mayoritas penduduknya berasal dari Pasaman dan Rao, sedangkan di pesisirnya berasal dari Tanah Datar, Batu Sangkar Sumatra Barat. Penjelasan mengenai penduduk dan adanya perjual-belian budak dari Nias di pelabuhan Susoh dapat dilihat dalam, Said Abubakar, *Berjuang Untuk Daerah*, (Banda Aceh Yayasan Nagasakti), hlm.16.

<sup>3</sup> T.H. El Hakimy, *Hadih Maja Peunileh*. (Banda Aceh : Rata), hlm. 67.

<sup>4</sup> Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1520 – 1675*. (Medan : Monora), hlm.96.

<sup>5</sup> H. Said Abubakar. *op.cit*.

<sup>6</sup> T.H El Hakimiy. *op.cit*



### Trafiking dan Teumon

Menurut definisi dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) menyebutkan trafiking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang untuk tujuan eksploitasi.<sup>7</sup> Penyebab dari trafiking adalah tingginya angka pengangguran, banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan dan tidak adanya kesetaraan gender serta lemahnya pengawasan (kontrol) dari aparat hukum maupun penguasa setempat serta tidak adanya pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan.<sup>8</sup>

Pada masa lalu, trafiking juga telah terjadi terhadap bangsa – bangsa dari etnik – etnik tertentu di dunia. Bangsa dan etnik – etnik tertentu di dunia ini tidak terlepas dari dinamika perubahan masyarakat sehingga terjadi migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi ini dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat tersebut, baik secara horizontal ataupun vertikal tergantung kreativitas generasi ke generasi dari etnik tersebut dalam menunjukkan jatidirinya di wilayah yang baru. Proses migrasi etnik ke suatu daerah dapat terjadi secara individual, kelompok, ataupun melalui rekrutmen oleh agen – agen yang menangani hal tersebut, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Rekrutmen ilegal berpeluang menjadi korban trafiking seperti yang terjadi terhadap orang – orang Nias yang dijadikan sebagai *teumon* (budak) di Aceh.

Jika dirunut ke masa lalu, praktek penjual – belian tenaga kerja telah terjadi sejak zaman jahiliah bahkan jauh sebelumnya. Sebelum Islam berkembang, praktek perjual-belian dari berbagai etnik

dari Afrika) sudah terjadi di Asia Barat seperti yang terdapat dalam referensi – referensi Arab dan Islam. Ketika Islam datang banyak di antara mereka yang dibebaskan sebagai budak. Ketika imperialisme dan kolonialisme Barat mulai merambahi seluruh penjuru dunia, praktek perjual-belian budak terjadi terhadap etnik-etnik di Asia, seperti pada orang – orang Cina, Mongolia dan India. Mereka diperjual-belian untuk bekerja di perkebunan maupun pengerahan tenaga dalam peperangan ketika bangsa Barat menghadapi perlawanan suatu bangsa atau kerajaan – kerajaan di seluruh dunia.

Di Indonesia, praktek trafiking dilakukan pada masa kolonialis Belanda terhadap etnik-etnik Jawa, Ambon, Lombok, Nusa Tenggara dan Manado. Keberadaan etnik Jawa di negara Suriname merupakan salah satu bentuk trafiking yang pernah dilakukan kolonial di Indonesia pada masa lalu. Di samping itu, korban trafiking dilibatkan oleh Belanda dalam mobilisasi tentara di wilayah nusantara pada masa konfrontasi untuk menunjukkan hegemoni persekutuan perdagangan khususnya rempah-rempah di wilayah nusantara seperti kerajaan Aceh, Goa, Tallo, Makassar, Ternate, Tidore, Aru, dan Maluku.

Menilik dari sisi kemanusiaan, trafiking merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dari sisi lain, trafiking adalah produk dari perjalanan sejarah penyebaran komunitas etnik ke seluruh dunia maupun Indonesia dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik oleh kelompok – kelompok etnis yang miskin sumber daya alam dan minimalnya perlindungan hukum bagi pekerja dari penguasa di daerahnya.

Anggapan ini menjadi dilematis bagi suatu wilayah negara dalam menerapkan pelarangan terhadap kegiatan trafiking disebabkan sulitnya masalah perekonomian dan lapangan kerja sehingga pekerja terpaksa mencari kehidupan di negeri lain yang memiliki prospek perekonomian dan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Keberadaan dari etnik-etnik dan ras tertentu di suatu negeri atau daerah lain lambat-laun

<sup>7</sup> [www.stoptrafiking.or.id](http://www.stoptrafiking.or.id)

<sup>8</sup> [www.pontianakpost.com/berita/](http://www.pontianakpost.com/berita/)

menyebabkan terjadinya difusi kultural (pembauran) di negeri lain, yang pada tataran lebih lanjut akan melahirkan peradaban baru. Keberadaan dan penyebaran ras Negroid dari Afrika di Asia, Eropa dan Amerika misalnya, tidak terlepas dari adanya pengaruh trafiking pada masa lalu yang telah melahirkan peradaban baru di negeri tujuannya.

Di Aceh, korban trafiking dari Nias dikenal dengan sebutan *teumon*. Dalam perjalanan sejarahnya golongan ini kemudian berbaur dengan masyarakat Aceh. Pembauran ini lama – kelamaan menghilangkan konotasi “*teumon*” menjadi “*Aceh*”, sehingga nantinya tidak diketahui lagi mana *teumon*, dan yang mana Aceh. Prosesi “pembauran” terjadi dari generasi ke generasi menghilangkan predikat golongan *teumon* dalam etnik-etnik lokal seperti Aceh, Aneuk Jamee, Simeulue. Mereka berbaur dalam kesamaan adat, hukum, dan bahasa dari etnik – etnik yang ada di Aceh sehingga mereka akhirnya menjadi *ureung* Aceh.

#### Genealogis “Nieh”

Sejarah memang punya potensi yang besar dalam menciptakan kebenaran, kebencian dan kemampuan memutarbalikkan fakta. Potensi itu diakui oleh orang Aceh, seperti bunyi *hadih maja*, “*Meunyoe ta banci, citlee peu daleh ; muenyoe ta gaseh nyang salah pi beuna*”. Artinya kalau sudah dibenci banyak sekali alasan ; kalau sudah disayang, yang salah pun jadi benar. Berdasarkan mitologi yang berkembang pada masyarakat Aceh primordial mengenai *ureung Nieh* menjadi sangat kontradiksi dengan silsilah manusia menurut *Al Qur’an* dan *hadist* yang merupakan pedoman hidup *ureung* Aceh. Menurut cerita, seorang putri raja yang menderita penyakit kulit (*kurab*) dibuang ke pulau Nias, dalam pembuangannya ia hanya ditemani oleh seekor anjing.

Di pulau ini, putri menemukan tanaman *peundang*. Akar pohon *peundang* inilah yang menyembuhkan sang putri dari penyakitnya.<sup>9</sup> Selanjutnya disebutkan

terjadinya perkawinan menyimpang antara putri tersebut dengan anjingnya. Hasil dari perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki. Ketika tumbuh dewasa, anak-laki ini ingin segera menikah, namun pulau Nias ketika itu belum berpenghuni. Ibunya memberikan dia sebuah cincin sebagai bekal untuk mencari istri. Dengan pedoman, wanita pertama yang memiliki jari yang cocok memakai cincin akan menjadi istrinya kelak. Setelah mengembara ke seluruh penjuru pulau, tidak seorang wanita pun yang ditemuinya, malahan akhirnya ia bertemu kembali dengan ibunya. Cincinnya ternyata tepat di jari manis ibunya. Mereka pun akhirnya kawin. Perkawinan *oedypus complex* inilah oleh *ureung* Aceh dianggap sebagai genealogis *ureung Nieh*.

#### Primordialisme dan Stigma “Nieh Keumudee”

Pandangan *ureung* Aceh terhadap orang Nias pada awalnya berkonotasi negatif, hal itu terlihat secara transparan dalam ungkapan “*Nieh keumudee, malam bee bui ; uroe bee asee*”. Artinya “Nias mengkudu, malam bau babi ; siang bau anjing”.<sup>10</sup> Hal ini mungkin karena perspektif *ureung* Aceh terhadap kedua hewan tersebut sangat diharamkan dan sekaligus “menjijikkan”, sehingga *ureung Nieh* oleh *ureung* Aceh dikonotasikan berperadaban lebih rendah dari peradaban mereka. Hampir sama halnya, ketika kolonialisme melanda Aceh pada abad ke-20, di mana anggapan *ureung* Aceh terhadap bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Hal itu tercermin dari ungkapan “*tapucrok bui ; teuka asee*”. Artinya, mengejar babi ; datang anjing. Maksudnya mengejar bangsa Belanda datang bangsa Jepang. Bangsa Belanda dikonotasikan sebagai “babi” dan bangsa Jepang dikonotasikan sebagai “anjing”. Kedua-duanya dianggap “kafir” sebagai unsur pembeda antara *ureung* Aceh dengan mereka.

Jika dirunut berdasarkan mitologi yang berkembang dalam masyarakat, menyebutkan bahwa keturunan *ureung Nieh*

<sup>9</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta : Yayasan Soko Guru), hlm.23

<sup>10</sup> *Ibid.*

## Wacana

berasal dari putri yang dibuang karena penyakit “*kurab*”, maka anggapan *ureung* Aceh dulu, *ureung Nieh* dianggap “*meukurab*”. Perbedaan agama dan kepercayaan sangat ditentang oleh *ureung* Aceh. *Ureung* Aceh masih sangat fanatik, dominan dalam mempertahankan diri, adat dan kebudayaan lokal sehingga mereka melakukan proteksi yang ketat. Fanatisme ini membuat kerajaan Aceh dapat eksis di nusantara sampai abad ke-20. Meskipun ada stigma negatif terhadap *ureung Nieh*, namun sebaliknya masyarakat Aceh sangat menyenangi mereka sebagai *teumon*. Mereka sering diambil menjadi tenaga kerja rumah tangga atau yang diperoleh melalui trafiking. *Ureung* Aceh beranggapan *ureung Nieh* sangat penurut, rajin, suka belajar, dan dapat dipercaya,<sup>11</sup> sehingga mereka lebih banyak dijadikan *teumon* di Aceh dibandingkan dengan orang Batak. *Teumon* wanita dari Nias terkenal cantik – cantik dan seolah – olah melebihi kecantikan wanita Aceh. Sedangkan para pemudanya banyak yang cakap sehingga ada yang direkrut menjadi penari *seudati*.<sup>12</sup> Di antara mereka disebutkan ada yang sempat *affair* dengan *ureung* Aceh.<sup>13</sup>

### Keberadaan Orang Nias Di Aceh

Praktek trafiking untuk dijadikan sebagai *teumon* atau pembantu rumah tangga dari golongan orang Nias ini pernah disebutkan dalam lembaran sejarah kolonial di Aceh. Salah satu referensi tentang hal tersebut adalah tulisan dari Christian Snouck Hurgronje yang berjudul “Aceh Di Mata Kolonialis”. Orang Nias pada awalnya datang ke Aceh sebagai tenaga kerja rumah tangga yang dalam bahasa Aceh disebut golongan *teumon*. Mereka dinilai “berperadaban lebih rendah” dibandingkan *ureung* Aceh. Hal itu berlaku menurut

pemahaman lama yang masih sangat primordialis.

Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan stigma tersebut berubah menjadi “positif”, setelah ada sebagian dari *ureung Nieh* yang dijadikan golongan tentara sebagai prajurit dalam perang saudara yang melanda Aceh selama hampir tiga tahun. Perang saudara ini terjadi antara Raja Sulaiman dan kerabat dekatnya Raja Ibrahim pada tahun 1854 – 1858.<sup>14</sup> Orang Nias yang pada mulanya ditatangkan dalam jumlah ratusan orang dengan cara diculik oleh pelaku trafiking. Namun mereka juga ada dalam jumlah lebih kecil yang langsung dibeli di daerahnya. Keberadaan mereka adalah bagian penting dalam perkembangan sejarah bangsa Aceh selanjutnya.<sup>15</sup>

Praktek trafiking orang Nias inilah yang melahirkan konotasi “negatif” dari etnik-etnik lokal di Aceh yang merasa lebih unggul posisinya, baik secara hegemonitas maupun perekonomiannya. Padahal keberadaan orang Nias di Aceh sangat membantu aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam proses produksi pertanian dan perekonomian bagi rumah tangga di Aceh.

### “Aneuk Meuih” Menjadi “Ureung Aceh”

Kebiasaan kehidupan berkeluarga besar *ureung* Aceh khususnya di pesisir Barat dan Selatan menganggap masalah genealogis berdasarkan garis keturunan ibu, sebagai sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, *ureung Aceh* sangat enggan untuk mendapatkan keturunan dari wanita budak atau anak hasil perkawinan dengan *teumon*, walaupun menurut ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup orang Aceh, hal tersebut “diperbolehkan”. Hubungan antara majikan Aceh dengan pekerja wanita (*teumon*) yang dimilikinya sangat langka terjadi bila dibandingkan dengan yang terjadi di negeri –

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Dalam referensi Snouck tarian tersebut disebut *Sadati*, lihat Christian Snouck Hurgronje, *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Atjehsch Staatbestuur*, dalam Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta : Yayasan Soko Guru, 1985), hlm.27.

<sup>15</sup> *Ibid.*

negeri Islam lainnya dalam periode yang sama.

Apabila terjadi hubungan seperti itu, maka akan dicari jalan keluar untuk mencegah atau menghilangkan akibatnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah anak terlahir dari hasil “perselingkuhan” dengan *teumon* Nias di Aceh. Seiring dengan perjalanan waktu, ada juga di antara *ureung Aceh* yang kawin dengan wanita Nias. Walaupun tanpa restu serta mendapat kebencian dari kerabat terdekatnya. Menurut stigma *ureung Aceh*, anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan “*teumon*” merupakan “*teumon*” dari orang yang melahirkan atau ibu kandung anak tersebut.

Dalam dunia perbudakan, secara fakta anak itu akan mengikuti jejak ibunya sebagai *teumon*. Sementara itu, adat di Aceh memperlakukan mereka sebagai orang bebas biasa. Kebiasaan yang terjadi pada masa itu, hanya dengan sebutan tertentu, orang akan mengetahui asal keturunan seseorang anak. Dengan kata lain, akan tampak jelas asal keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan dengan pernikahan sah atau tanpa pernikahan sah, baik secara *hukom* maupun adat – istiadat. Setelah satu atau dua generasi kemudian, sebutan “*aneuk meuih*” akan hilang dan nantinya anak-anak itu sepenuhnya menjadi *ureung Aceh*. Sedangkan anak-anak yang terlahir dari perkawinan sesama *teumon* (dari majikan yang sama), anak keturunannya tetap menyandang predikat *teumon* juga. Tetapi banyak majikan pemilik *teumon* yang membebaskan mereka setelah mencapai usia dewasa dan lanjut. Orang Nias yang bebas ini, hanyalah dikarenakan suatu keistimewaannya. Mereka dapat memperoleh istri dari wanita Aceh. Keturunan mereka kelak juga boleh mengambil istri dari berketurunan campuran Aceh – Nias. Baru dalam generasi ketiga, mereka benar-benar menjadi orang Aceh penuh, walaupun masih tetap menyandang “*biek teumon*” atau “keturunan budak”. Sedangkan majikan yang hanya memiliki seorang atau dua orang *teumon* laki-laki, pada umumnya

membiarkan mereka membujang selama hidupnya. Dengan pengertian, bahwa mereka juga akan memperoleh kesempatan untuk “kawin” dengan golongan sesama *teumon* wanita dari lain majikan.

Setelah masa perang saudara pada tahun 1854 sampai 1858. *ureung Aceh* cenderung tidak mengerjakan lagi persawahannya dan hanya bekerja menurut keinginannya sendiri sehingga mereka harus mengimpor beras dari luar daerah Aceh. Selama periode itu sebagian besar pekerjaan di Aceh dikerjakan oleh orang Nias. Mereka tidak hanya diperjualbelikan untuk menggarap tanah pertanian dan penanaman lada, tetapi juga digunakan untuk menjadi serdadu dalam perang-perang skala kecil yang terus-menerus terjadi dan membuat wilayah Aceh terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil. Ketika perang saudara antara Raja Sulaiman dengan Raja Ibrahim, pasukan Raja Ibrahim terdiri dari orang-orang Nias. Merekalah yang dikerahkan dalam melakukan operasional terhadap musuh (pasukan Raja Sulaiman).<sup>16</sup>

#### Penutup

Permasalahan trafficking, dan penjualan budak pada masa lalu maupun masa kini melahirkan berbagai dinamika dan perubahan persepsi. Berbagai mitologi dan kronologi terhadap “etnik asing” sengaja dibuat untuk menunjukkan jati diri mereka yang lebih rendah dibandingkan “etnik asli” sehingga melahirkan asumsi negatif terhadap pendatang. Hal ini pernah terjadi terhadap orang Nias di Aceh, namun anggapan itu hilang dengan sendirinya setelah adanya proses difusi kultural karena interrelasi budaya yang melahirkan peradaban Aceh sejatinya. Berdasarkan *hadih maja* mengenai keberagaman dengan perspektif budaya yang menyebutkan; *meunyo nyang brok pih eue beudo, beuranggaho pih gob upat ; meunyo nyang get pih eue buedo, beuranggaho jeuet keu sahat*”, Artinya kalau jelek akhlak/budi ke mana pun ia akan dicaci – maki. Kalau

<sup>16</sup> Penjelasan mengenai perang ini lihat J.A. Kruyt, *Atjeh en de Atjehers*, hlm.54.

## Wacana

---

baik akhlak/budi, kemana pun ia pergi akan tetap menjadi sahabat. Mereka juga diibaratkan ;*lagee peuraho dalam bakat, hana teutap siat puro ; ureung dagang lam meularat, Timu – Barat cula-caloe*". Artinya, seperti perahu dalam hempasan ombak, selalu terombang-ambing posisinya; perantau sedang melarat, di Timur – di Barat selalu dalam kesibukan. Maksudnya, begitulah nasib orang yang terus – menerus mencari kehidupannya.

Perbedaan dan keragaman kebudayaan antaretnik sebagai *sunnatullah* harus tetap dihargai dalam menciptakan stabilitas dan kedamaian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang, semua etnik diciptakan Tuhan tidaklah sama, baik fisik, jenis kelamin, agama kepercayaan, bahasa, pekerjaan, dan kebudayaannya, namun pada hakikatnya manusia adalah sama yaitu sama – sama mencari penghidupan yang lebih baik. Hanya kearifan dan kebijaksanaanlah yang dapat menunjukkan bahwa sesama manusia tetap membutuhkan untuk dapat saling mengisi kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lainnya.

---

Hasbulah, S.S adalah Tenaga Peneliti Pamong Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Sistem Kekerabatan dan Kehidupan Orang Cina (Khek/Hakka) di Banda Aceh

Oleh : Piet Rusdi

### Pendahuluan

Sejak abad 19 pranata perkawinan dan sistem kekerabatan telah mendapat perhatian ahli ilmu sosial, khususnya antropologi. Bahkan konsep-konsep antropologis tertua banyak berkaitan dengan perkawinan dan kekerabatan. Hampir tak ada topik lain dalam antropologi selain sistem kekerabatan yang begitu banyak mendapat perhatian ahli antropologi.<sup>1</sup>

Menurut *Keesing*<sup>2</sup> besarnya perhatian ahli antropologi pada topik kekerabatan karena : *Pertama*, kekerabatan merupakan acuan hubungan sosial. Hubungan kekerabatan merupakan acuan bagi interaksi dengan orang lain yang bukan kerabat dan sering juga dengan para dewa. Hubungan "*kekerabatan fiktif*" antara orang tua angkat dengan anak angkat mengambil pola hubungan kekerabatan. *Kedua*, kekerabatan sebagai nilai vokal. Hak dan kewajiban dalam ikatan kekerabatan merupakan kewajiban moral. *Ketiga*, kekerabatan memiliki variasi yang terbatas. Keterbatasan variasi sistem kekerabatan terletak pada pola hubungan elemen-elemen dalam membentuk sistem.

Analisis ahli antropologi tentang kekerabatan telah melahirkan berbagai pendapat, konsep dan teori yang tidak saja saling melengkapi tetapi juga terkadang saling bertentangan satu sama lain.

Dalam kata pengantar buku "*Kinship, Descent and Alliance Among the Karo Batak*" yang ditulis *Masri Singarimbun, J.A. Barnes* mengatakan bahwa pertentangan ini

berawal dari ketidaksempurnaan atau kekosongan data akurat, sehingga perdebatan teoritis ahli antropologi hanya didasarkan pada dugaan belaka.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara multi etnik yang terdiri dari berbagai adat, kebudayaan dan tata cara kehidupan yang tersebar dalam kehidupan tiap-tiap etnis. Di Indonesia terdapat ± 300 suku bangsa yang setiap suku itu memiliki bahasa dan identitas kultural berbeda sehingga tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.<sup>4</sup>

Tiap etnik umumnya menempati wilayah geografis tertentu yang merupakan suku bangsa asli dan dikategorikan sebagai etnik pribumi, selain itu ada etnik pendatang yang lazim disebut etnik non pribumi seperti keturunan Arab, India dan Cina. Di Indonesia, kelompok masyarakat non pribumi yang paling besar jumlahnya adalah orang Cina dan mempunyai potensi yang amat penting terutama disektor perekonomian / perdagangan.

*Orang Cina* adalah salah satu kelompok masyarakat non pribumi yang bermigrasi ke Indonesia. Migrasi menurut *Brinley Thomas*, adalah gerakan perpindahan dari satu negara ke negara lain yang disebabkan oleh kemauan sendiri yang bersangkutan baik secara perorangan maupun berkelompok.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Lihat Rosarius Naingalis, "Sistem Kekerabatan dan Perkawinan Orang Manggarai di Flores Barat Nusa Tenggara Timur", *Skripsi* Fakultas Sastra UGM, 1994.

<sup>4</sup> Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komunitas dalam Masyarakat majemuk Indonesia", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th XXV, No. 66 Sept-Des 2001, hlm 1-12.

<sup>5</sup> Indriani, "Migrasi dan Kegiatan Ekonomi Suku Bangsa Cina di Aceh Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (1873-1930)", dalam *Bulletin Haba* No. 10/99, Banda Aceh :BKSNT, 1999, hlm 17-22.

<sup>1</sup> G.P.Murdock, *Social Structure*, (The Macmillan Company, New York, 1949), hlm. 91.

<sup>2</sup> Roger. E. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* edisi kedua, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999), hlm.236-240.

Mereka datang ke Indonesia melalui gelombang-gelombang migrasi yang besar dari Malaysia dan daratan Cina pada abad 18, 19 dan awal abad ke-20.<sup>6</sup> Mereka meninggalkan daratan Cina akibat meletusnya Perang Candu (1839-1842) dan pemberontakan Thaiping (1851-1865) yang telah menimbulkan ketidakstabilan politik, hancurnya perekonomian dan terjadinya penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan dinasti Cina.<sup>7</sup>

Kebanyakan orang-orang Cina ini berasal dari berbagai propinsi di negara Cina dengan suku bangsa yang berbeda-beda pula, antara lain suku bangsa Hokkian yang berasal dari Propinsi Fukien dan suku bangsa Hakka, Teo-Chiu yang berasal dari Propinsi Kwangtung.<sup>8</sup>

Mereka datang ke Indonesia membawa kebudayaan masing-masing dengan perbedaan bahasanya. Ada empat perbedaan bahasa Cina di Indonesia yaitu : bahasa Hokkian, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton yang semuanya memiliki perbedaan yang sangat besar sehingga pemakai bahasa yang satu tidak dapat mengerti bahasa yang lainnya.<sup>9</sup>

Suku bangsa Hakka termasuk orang Cina yang paling banyak merantau ke luar negeri. Mereka merantau karena terpaksa atas kebutuhan mata pencaharian hidup. Selama berlangsungnya migrasi dari 1850 sampai 1930 mereka adalah yang paling miskin diantara para perantau Tionghoa lainnya.<sup>10</sup>

Persebaran suku bangsa Hakka di Indonesia lebih dominan di luar pulau Jawa.

---

<sup>6</sup> William, G. Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa", dalam *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Mely G Tan (ed), (Jakarta :Penerbit PT Gramedia, 1981), hlm. 1-14.

<sup>7</sup> Indriani, *op.cit.*, hlm.17-22

<sup>8</sup> Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia", *Mamusa dan Kebudayaan Indonesia*, Koentjaraningrat (ed), (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1986), hlm 346-366.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Skinner, *op.cit.*, hlm.7

Dalam lapangan usaha, mereka lebih tertarik sebagai kuli perkebunan dan pertambangan di Sumatera Timur dan Kalimantan Barat. Mereka juga banyak terdapat di pantai timur Sumatera mulai dari Deli dan Medan, hingga ke Aceh yang merupakan salah satu propinsi paling barat di ujung pulau Sumatera, yang juga menjadi sasaran tempat migrasinya orang Cina (suku bangsa Hakka) pada waktu dulu.

### Sejarah Keberadaan Suku Bangsa Hakka

Sejarah migrasinya orang Cina ke Aceh pada awalnya secara berombongan yang terjadi pada tahun 1875 atas usaha WP Groeneveld selaku komisaris pemerintah Hindia Belanda, dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai "pekerja-pekerja bebas" guna kepentingan pemerintah Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Pada tahun 1877 datanglah ± 4886 orang Cina dari pelabuhan Singapura dan Penang ke Aceh, sebagian besar mereka datang dengan biaya sendiri<sup>12</sup>. Dengan masuknya orang Cina ini, maka tersebarlah mereka di berbagai daerah yang terdapat di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu tujuannya adalah kota Banda Aceh yang merupakan ibukota propinsi pada saat ini. Orang Cina merupakan golongan sosial nomor dua terbesar di kota Banda Aceh. Orang Cina yang tinggal di Banda Aceh 70% adalah suku bangsa Hakka dan 30% suku bangsa Hokkian dan Kanton (Kwongfu).<sup>13</sup>

Mereka yang tinggal di kota Banda Aceh nampak hidup secara berkelompok di sekitar jalan Perdagangan, jalan Merduati, jalan Diponegoro, jalan Sabang dan sekitarnya, jalan Muhammad Jam sebelah utara. Kelompok lain terdapat di pasar

---

<sup>11</sup> Irchamni Sulaiman, Irchamni, *Pengusaha Aceh dan Pengusaha Cina di Kotamadya Banda Aceh*, (PLPIIS Darussalam- Banda Aceh, 1983). hlm.13.

<sup>12</sup> Indriani, *op.cit.*, hlm. 17-22

<sup>13</sup> T. Syamsuddin, *Pemetaan suku Bangsa Melalui Aspek Budaya di Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: BKSNT, 1995 / 1996).

Peunayong dan sekitarnya dan di pasar sayur Kampung Setui.

Bahasa yang mereka pakai untuk kepentingan bisnis dan hubungan sosial, banyak menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa dari mereka juga dapat berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Bahasa Hakka digunakan apabila mereka berhubungan antar keluarga dan sesama orang Cina, serta ada hal-hal rahasia yang ingin mereka sampaikan.

Di Banda Aceh, seperti halnya di seluruh Indonesia, mereka tidak lagi memakai nama Cina, tetapi telah diganti dengan nama Indonesia. Seperti Lim menjadi Salim, Goh menjadi Gozali, Tan menjadi Tanzil, San menjadi Santoso, Oei menjadi Wijaya dan lain-lain yang mengalami perubahan nama.

#### Kehidupan Sosial dan Budaya

Orang Cina pada umumnya akan berusaha dalam lapangan pengusahaan, perdagangan, jasa dan industri. Semua orang Cina dalam berdagang atau berusaha, hemat, ulet, sabar serta tahan dalam berusaha. Tidak seperti masa dulu hanya suku Hokkian saja yang pandai berdagang atau berusaha dalam lapangan pengusahaan.<sup>14</sup>

Sekarang suku bangsa Hakka juga telah mahir menjalankan usaha dagangnya, tidak pada awalnya, suku bangsa Hakka hanya bekerja sebagai buruh pertambangan, pelabuhan, perkebunan dan lain-lain. Jadi sudah menyimpang dari sifat suku bangsa mereka masing-masing pada masa lalu.<sup>15</sup>

Demikian juga di kota Banda Aceh, suku bangsa Hakka menjadi pedagang perantara bagi penduduk setempat. Pusat usaha mereka melalui toko-toko di sekitar pasar Aceh, pasar Peunayong dan pasar Setui. Sehingga bisa dikatakan sampai sekarang kehidupan ekonomi, praktis masih dikuasai oleh golongan minoritas keturunan Cina ini.

Orang Cina di dalam pengembangan usahanya, lebih dipengaruhi oleh ikatan keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh *Ong Eng Die* bahwa satu faktor penting yang sangat mempengaruhi kehidupan usaha orang Cina adalah "*ikatan keluarga*". Seorang Cina cenderung membuka usaha dengan modal sendiri atau setidaknya dengan modal keluarga. Sebaliknya ia jarang bersedia memasukkan modalnya dalam usaha di luar perusahaan keluarganya.<sup>16</sup> Begitu juga suku bangsa Hakka yang ada di kota Banda Aceh, mereka dalam pengembangan usahanya selalu dipengaruhi oleh ikatan keluarganya.

Suku bangsa Hakka mempunyai kehidupan sosial kultural yang berbeda dengan orang Aceh, mereka memiliki tata kehidupan norma-norma yang berlaku pada masyarakatnya, terutama sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhurnya.

Suku bangsa Hakka ini telah banyak mengalami perubahan dalam kehidupan sosial kulturalnya, tetapi ciri-ciri kecinaan mereka masih tampak wujudnya dalam kehidupan mereka, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, norma-norma yang berlaku pada masyarakatnya serta dalam sistem kekerabatan.

Dalam kehidupan sehari-hari apabila rumah orang Aceh bersebelahan dengan rumah orang Cina, mereka lebih cenderung untuk bergaul dan saling kenal sesama tetangga. Hal ini bisa dilihat ketika salah satu diantara mereka ada yang terkena musibah, seperti meninggal dunia pada rumah orang Aceh. Orang Cinanya akan melayat ke rumah korban untuk turut berduka cita, begitu juga kebalikannya.

Lain halnya pada pesta perkawinan, rasa hormat menghormati sesama tetangga akan terlihat. Apabila ada orang Aceh mengadakan pesta perkawinan, orang Cina nya mau datang ke pesta perkawinan tersebut, begitu juga sebaliknya. Sesama

<sup>14</sup> Puspa Vasanty, *op.cit.*, hlm. 351.

<sup>15</sup> Pasifikus Ahok, *Kembali Pengusaha Tionghoa di Banda Aceh*. (Banda Aceh : PLPIIS, 1976), hlm. 2.

<sup>16</sup> Tan, Mely G (ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia. Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. (Jakarta : Gramedia, 1981). hlm. XIX



## Wacana

tetangga mereka akan saling membantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Berbeda lagi sewaktu-waktu hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri. Pada Hari Raya ini orang Cina juga mengunjungi rumahnya orang Aceh untuk bersilaturahmi yaitu ikut bermaaf-maafan. Dalam kunjungan tersebut orang Cina membawa sebuah bingkisan berupa oleh-oleh untuk yang punya rumah. Bingkisan tersebut berupa kue kaleng ataupun parcel (bingkisan yang terdiri dari beberapa makanan kaleng dan minuman). Semuanya itu tergantung dari kemampuan masing-masing.

Akan tetapi, ada juga masyarakat Cina yang hidup berkelompok di beberapa tempat. Tanpa adanya pergaulan dengan masyarakat Aceh di lingkungan ia berada. Masyarakat Cina ini lebih cenderung untuk bergaul dengan lingkungannya sendiri yaitu sesama orang Cina.

Dalam hal pekerjaan, masyarakat Cina di kota Banda Aceh beserta penduduk pribuminya (Aceh) cenderung untuk bekerjasama atau saling membutuhkan. Hal ini dapat dilihat ketika sebagian penduduk setempat (Aceh) bekerja pada toko-toko orang Cina. Misalnya anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa pada masyarakat Aceh yang tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Ia akan bekerja pada toko-toko orang Cina yang lebih cenderung menjualkan barang dagangannya dalam satu jenis barang. Seperti : toko besi, super market, alat-alat tulis dan buku, aksesoris mobil dan lain-lain. Karena toko-toko seperti ini dibutuhkan tenaga ekstra dalam bekerja.

Berbeda lagi dengan perempuan Acehnya, yang bekerja pada orang Cina biasanya dalam hal rumah tangga. Seperti menjadi pembantu, tukang cuci, *baby sister*, dan lain-lain. Namun ada juga yang menjadi karyawan toko seperti : photo studio, handphone, toko baju dan lain-lain.

Masyarakat Cina di kota Banda Aceh dalam berkomunikasi mereka memakai bahasa Hakka. Walaupun diantara mereka ada yang bukan suku bangsa Hakka tetapi suku bangsa Hokkian, Kanton, Teo-Chiu

semuanya tetap berbicara dengan bahasa Hakka. Lain halnya bila ada orang Cina yang bukan suku bangsa Hakka tetapi suku bangsa Hokkian. Mereka apabila berjumpa sesama suku bangsa Hokkian maka menggunakan bahasa Hokkian. halnya bila ada orang Cina yang bukan suku bangsa Hakka tetapi suku bangsa Hokkian. Mereka apabila berjumpa sesama suku bangsa Hokkian maka menggunakan bahasa Hokkian. Akan tetapi lain halnya dalam dunia bisnis, bahasa yang mereka pakai untuk kepentingan bisnis dan hubungan sosial banyak menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa dari mereka juga dapat berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Bahasa Hakka digunakan apabila mereka berhubungan antar keluarga dan sama-sama orang Cina. Demikian juga bahasa Hakka mereka ucapkan apabila ada hal-hal yang rahasia yang ingin mereka sampaikan.

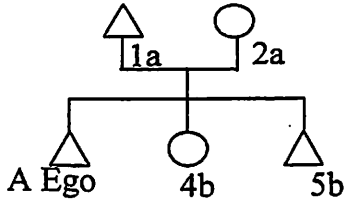
### Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Hakka

Sistem kelompok keluarga masyarakat Cina khususnya suku bangsa Hakka di kota Banda Aceh pada umumnya menganut sistem keluarga inti monogami. Namun masih ada juga sistem keluarga yang telah menikah menetap bersama-sama dalam keluarga inti dari ayah si suami, atau disebut bentuk keluarga luas virilokal.

Dalam prinsip keturunannya masyarakat suku bangsa Hakka adalah patrilineal, yaitu garis keturunan dihitung dari pihak ayah atau menurut garis laki-laki. Prinsip patrilineal mereka ini bisa dilihat dari hubungan kekerabatannya. Di mana hubungan dengan anggota kerabat pihak ayah lebih erat daripada hubungan dengan kerabat pihak ibu.

Pada masyarakat suku bangsa Hakka memiliki istilah-istilah kekerabatan sehari-harinya, dan hanya di kenal untuk tiga tingkat ke atas dan tiga tingkat ke bawah dari Ego. Hal ini dikarenakan mereka hanya mengenal karena sebatas pengetahuan yang didapatkan dari orang tua ataupun kakek mereka. Karena semasa hidup mereka sudah tidak ada lagi keturunan tingkat tiga ke atas (ayahnya kakek).

Bagan Keluarga inti



Penjelasan hubungan diri (inter personal relationship) pada keluarga luas

Istilah Indonesia	Menyapa	Menyebut
Bapak mertua (1a)	Ka kon	Ka kon ngai
Ibu mertua (2a)	Ka nyong	Ka nyong ngai
Suami (1b)	Dipanggil namanya	Lo kung ngai
Ego	Dipanggil namanya	Ngai
Adik ipar laki-laki (2b)	Suk cai	Suk cai
Istri adik ipar laki-laki (2c)	Lo thai	Lo thai
Anak laki-laki (1d)	Dipanggil namanya	Lai
Anak perempuan (2d)	Dipanggil namanya	Moi

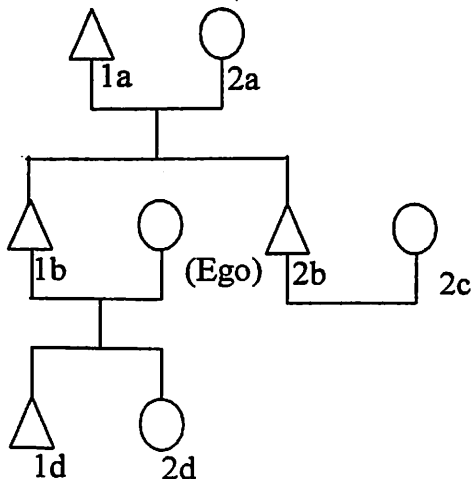
Penjelasan hubungan diri (inter personal relationship) pada keluarga inti (nuclear family)

Istilah Indonesia	Menyapa	Menyebut
Bapak (1a)	Apa	Apa ngai
Ibu (2a)	A mak	A mak ngai
Ego (A)	dipanggil namanya	Ngai
Adik perempuan (4b)	Lo moi	Lo moi
Adik laki-laki (5b)	Lo thai	Lo thai

Istilah Penjelasan Hubungan Diri (Inter Personal Relationship) Bagi Keturunan Ego Perempuan / laki-laki

Istilah Indonesia	Menyapa	Menyebut
Ego (individu)	Dipanggil namanya	Ngai
Kakak perempuan	A cie	A cie
Kakak laki-laki	A ko	A ko
Adik laki-laki	Lo thai	Lo thai
Adik perempuan	Lo moi	Lo moi
Suami kakak perempuan	Ci chong	Ci chong
Isteri kakak laki-laki	A so	A so
Suami, istri	Dipanggil namanya	Lo kung / lo pho
Isteri adik laki-laki	Lo thai / Sim khiu	Lo thai / Sim khiu
Kakak perempuan bapak	Ku ku / A ku	Ku ku / A ku
Kakak laki-laki bapak	A pak	A pak
Bapak	A pa	A pa ngai
Adik laki-laki bapak	A suk / Suk me	A suk / Suk me
Adik perempuan bapak	Ku ku	Ku ku
Ibu	A mak	A mak ngai
Kakak perempuan ibu	A yi	A yi
Kakak laki-laki ibu	Khiu-khiu	Khiu khiu
Adik laki-laki ibu	Khiu khiu / Pak me	Khiu khiu / Pak me
Adik perempuan ibu	A yi	A yi
Kakek / ayah ayah	Kung kung	Kung kung ngai
Kakak perempuan kakek	Pak pho	Pak pho
Kakak laki-laki kakek	Pak khun	Pak khun
Adik laki-laki kakek	Suk kung	Suk kung
Adik perempuan kakek	Suk pho	Suk pho
Nenek	Aphoi	Aphoi ngai
Kemenakan perempuan	Ngoi sen moi	Ngoi sen moi
Kemenakan laki-laki	Ngoi sen lai	Ngoi sen lai
Anak laki-laki	Dipanggil namanya	Lai
Anak perempuan	Dipanggil namanya	Moi
Menantu laki-laki dan perempuan	Dipanggil namanya	Se long / Sim khiu
Cucu	Dipanggil namanya	Sun
Cicit	Dipanggil namanya	Sat

Bagan Keluarga Luas



### Penutup

Orang Cina di kota Banda Aceh telah banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya orang Aceh dengan baik. Hal ini terlihat setiap rumah kediaman orang Cina berdampingan dengan rumah kediaman orang Aceh. Kenyataan ini membedakan orang Cina di kota Banda Aceh dengan orang Cina yang berada di kota-kota lainnya. Umpamanya di kota Medan mereka cenderung untuk berkelompok membentuk suatu perkampungan Cina yang hanya didominasi oleh suku bangsa mereka sendiri.

Masyarakat Cina di kota Banda Aceh telah banyak belajar mengenai kehidupan sosial budaya orang Aceh. Seperti dalam lingkungan perkumpulan, bahasa, pasar, upacara adat, lingkungan pergaulan sehari-hari dan lain-lain. Hal ini terlihat sebahagian masyarakatnya mahir berbahasa Aceh, sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut banyak dijumpai pada orang dewasa saja. Walaupun masyarakat Cina di kota Banda Aceh telah banyak mengalami perubahan dalam kehidupan sosial budayanya mereka masih kuat berorientasi kepada kultur nenek moyang mereka terutama dalam keyakinan beragama, kepercayaan maupun tradisi, sebab orang-orang Cina semenjak kecil telah ditanami rasa kepercayaan yang kuat.

---

Piet Rusdi, S. Sos adalah Tenaga Penelaah pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

# Tjong A Fie: Philantropi Tionghoa Di Medan

Oleh : Harvina

## Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki aneka ragam etnis, yang terdiri dari etnis lokal dan etnis asing. Etnis Asing diantaranya terdiri dari etnik Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Namun diantara sekian banyak etnis itu, etnis Tionghoa yang lebih menonjol keberadaannya dibandingkan dengan etnis asing lainnya.

Etnis Tionghoa tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menyebut dirinya dengan istilah *Tenglang* (Hokkien), *Tengnang* (Tiochiu), atau *Thongnyin* (Hakka). Sedangkan dalam dialek Mandarin disebut *Tangren* (Hanzi: bahasa Indonesia: Orang Tang). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa etnis Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Cina Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sedangkan Cina Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi, Hanyu, Pinyin: hanren, bahasa Indonesia: Orang Han).

Leluhur etnis Tionghoa<sup>1</sup> Indonesia telah bermigrasi secara periodik dan bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan terbentuk. Catatan-catatan literatur Cina menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu-lintas barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara maupun sebaliknya.

<sup>1</sup> Tionghoa atau tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di Indonesia, yang berasal dari kata *zhonghua* dalam Bahasa Mandarin. *Zhonghua* dalam dialek Hokkien dilafalkan sebagai *Tionghoa*.

## Sejarah Tionghoa di Indonesia

Bangsa Cina telah ribuan tahun mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah satu catatan-catatan tertua ditulis oleh para agamawan Fa Hsien pada abad ke -4 dan terutama I Ching pada abad ke-7. I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Budha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jnanabhadra.

Kemudian dengan berkembangnya negara kerajaan di tanah Jawa mulai abad ke-8, para imigran Cina pun mulai berdatangan. Pada prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama suku bangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anak benua India. Dalam prasasti-prasasti ini orang-orang Tionghoa disebut sebagai *Cina* dan seringkali jika disebut dihubungkan dengan sebuah jabatan bernama *Juru Cina* atau kepala orang-orang Tionghoa.<sup>2</sup>

Berdasarkan *Volkstelling* (sensus) penduduk tahun 1930 di masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%). Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.

Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika responden sensus ditanyakan mengenai asal suku mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Perkiraan kasar

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>.

## Wacana

yang dipercaya mengenai jumlah suku Tionghoa-Indonesia saat ini ialah berada di antara kisaran 4%-5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia.<sup>3</sup>

### Penyebaran Etnis Tionghoa di Indonesia

Sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam jumlah besar selain di daerah perkotaan seperti Sumatera Utara, Bangka-Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Adapun wilayah yang mereka tempati, yaitu:

- Hakka-Aceh, Sumatera Utara, Batam, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Manado, Ambon dan Jayapura.
- Hainan-Riau (Pekanbaru dan Batam), dan Manado.
- Hokkien-Sumatera Utara, Pekanbaru, Padang, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa, Bali (terutama di Denpasar dan Singaraja), Banjarmasin, Kutai, Sumbawa, Manggarai, Kupang, Makassar, Kendari, Sulawesi Tengah, Manado, dan Ambon.
- Kantonis-Jakarta, Makassar dan Manado. Hokchia-Jawa (terutama di Bandung, Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya).
- Hokchia-Jawa (terutama di Bandung, Cirebon, Banjarmasin dan Surabaya).
- Tiochiu-Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat (khususnya di Pontianak dan Ketapang).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

### Siapa Tjong A Fie

Tjong A Fie alias Tjong Fung Nam dilahirkan pada 1860 di desa Sung Kow (Mei Xien), Guangdong China. Sebagaimana layaknya seorang pemuda, jiwa dan darah muda Tjong A Fie telah membawa beliau meninggalkan daratan Cina serta menyebrang lautan hingga ke Pantai Timur Pulau Sumatera, tepatnya kota Labuhan.<sup>5</sup>



Tjong A. Fie

(Sumber: <http://licagneshendra.blog.friendster.com>)

Kedatangan Tjong A Fie di Tanah Deli adalah setelah mendengar kabar bahwa abangnya Tjong Yong Hian telah sukses di kawasan itu. Mula-mula Tjong A Fie membuka perkebunan tembakau dan menetap di Labuhan Deli, sekitar 20 kilometer dari pusat kota Medan. Selain membuka perkebunan tembakau, ia juga membuka kedai yang melayani kebutuhan kuli-kuli Cina daratan yang baru datang ke Tanah Deli. Kedai tersebut, oleh Tjong A Fie, diberi nama Bun Yon Tjong.

Banyaknya orang-orang Cina yang merantau membuat kedai Bun Yon Tjong semakin ramai dikunjungi. Tjong A Fie dalam sekejap jadi kaya raya, imperium bisnisnya kemudian menjalar ke mana-mana. Tjong A Fie tidak hanya dikenal sebagai konglomerat Cina yang sukses di Labuhan Deli, tetapi juga punya kekuatan politik

<sup>5</sup> Pos Metro Medan, 1 November 2008, hlm

karena kedekatannya dengan Sultan Deli dan orang-orang Belanda.

Pemerintahan Hindia Belanda menunjuk opsir dari pangkat Letnan sampai Mayor. Mereka dipilih karena mereka adalah orang-orang yang sukses dan mendapat penghormatan dan status di dalam komunitas mereka. Setelah Tjong Yong Hian meninggal di tahun 1911. Tjong A Fie adalah pengganti abangnya sebagai Mayor yang tercatat pada tanggal 4 September 1885 dan ia menjadi representatif tertinggi buat masyarakat Tionghoa di Sumatera Timur.

Bersama dengan ditunjuknya Tjong A Fie sebagai opsir Tionghoa ia mendapatkan hak istimewa dalam perdagangan. Tjong A Fie mewakili kira-kira 75% dari perumahan yang tumbuh pesat di Medan, bahkan hampir di seluruh kota Tebing Tinggi. Fasilitas yang diberikan pemerintah bagi Tjong bersaudara telah berhasil membangun keuntungan yang amat besar dalam usaha real estate, hotel, bank dan perkebunan sawit.<sup>6</sup>

Karena kejeliannya melihat peluang bisnis, maka Tjong A Fie kemudian memindahkan pusat imperium bisnisnya ke Medan. Di tahun 1886 ia membangun pasar daging dan setahun kemudian tahun 1887 ia membangun pasar ikan di Kesawan dan tahun 1906 ia membangun pasar untuk sayur-mayur. Pada masa inilah Tjong A Fie membangun rumahnya di Kesawan, yang kemudian menjadi pusat bisnis di kota Medan dan sampai sekarang masih bisa dilihat puluhan bangunan pertokoan kuno di sekitar Kesawan.

Setelah menjadi orang sukses di Tanah Deli, Tjong A Fie tak lupa akan tanah leluhurnya. Di Provinsi Nanking, Cina, Tjong A Fie membangun sebuah pabrik, untuk mendorong perindustrian di sana. Atas jasa-jasanya yang begitu besar pada Kerajaan Cina, Tjong A Fie diangkat menjadi bangsawan dengan gelar Tjje Voe.

### Philantropi Tjong A Fie Untuk Kota Medan

Tjong A Fie dikenal sebagai dermawan dan banyak berjasa dalam pembangunan kota Medan. Sebagai juragan kaya-raya yang punya kekuatan politik Tjong A Fie jadi tokoh yang amat dihormati di Medan. Dia juga mendirikan rumah sakit Cina pertama di Medan, namanya Tjje On Jie Jan. Pendirian rumah sakit ini berasal dari keuntungan yang ia dapatkan dari hasil pasar-pasar yang ia dirikan yang kemudian ia simpan di Yayasan Tjje On Djie Jan.

Keluhuran budi Tjong A Fie juga ditunjukkannya ketika ia membangun kuburan khusus untuk orang-orang Cina di Medan. Pasalnya, ketika jalur kereta api Medan-Belawan di bangun, Tjong A Fie sering menerima laporan kalau para pekerja sering menemukan tengkorak orang Cina. Untuk menghormati jenazah orang-orang Cina itulah, ia kemudian membangun perkuburan Cina di daerah Pulo Brayon, Medan. Dialah orang yang merintis dibangunnya jalur kereta api yang menghubungkan Medan dengan wilayah Pelabuhan Belawan.

Tjong A Fie ternyata juga mempunyai peran dalam membangun Istana Maimoon milik Sultan Deli. Ketika itu, sekitar tahun 1888, Sultan Deli yang sedang berkuasa, Sultan Makmun Al Rasyid hendak membangun sebuah istana di Medan. Tjong A Fie pun menyumbang dana untuk membangun istana tersebut. Kabarnya, Tjong A Fie menyumbang sampai 1/3 biaya pembangunan Istana Maimoon, yang sampai sekarang masih bisa ditemukan di jalanan yang terletak satu garis lurus dengan istana Tjong A Fie di Kesawan. Selain Istana Maimoon ia juga menyumbang untuk pembangunan Mesjid Raya Medan.<sup>7</sup>

Peninggalan Tjong A Fie di Medan yang paling mengesankan adalah sumbangan sebuah jam besar kepada Kotapraja Medan pada tahun 1913. Jam itu sampai sekarang masih dipajang di Balai Kota Medan. Jam

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup><http://www.ceritanet.com/22tjong.htm>.

## Wacana

buatan firma Van Bergen di Heilgerlee Belanda itu dipersembahkan Tjong A Fie khusus untuk kota Medan.



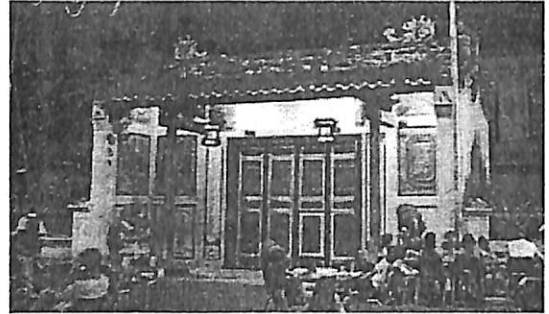
Istana Maimoon salah satu yang di sumbang Tjong A Fie. Sumber: tekongan-com Jurnalisme kita-kita

### Penutup

Itulah Tjong A Fie yang menoreh kisah sejarahnya di kota Medan. Sedikit banyak peninggalan Tjong A Fie untuk pembangunan kota Medan. Nama Tjong A Fie pun sempat diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Medan, meski nama jalan tersebut kemudian diganti lagi menjadi jalan KH.Ahmad Dahlan.

Jadi bila kita sudah pernah ke kota Medan dan tak mendengar nama Tjong A Fie, artinya kita cuma ke setengah kota Medan. Itu artinya kita belum ke Kesawan, kalau di peta resminya jalan Ahmad Yani. Di sana ada puluhan bangunan kuno, tapi satu yang termegah milik Tjong A Fie.

Bangunan megah itu berdiri sejak akhir tahun 1800-an dengan arsitektur bergaya Tiongkok kuno. Istana itu pemiliknya, Tjong A Fie, adalah bagian dari sejarah kota Medan. Tjong A Fie meninggal pada tanggal 8 Februari 1921.



Rumah Tjong A Fie Di Kesawan. Sumber: tekongan-com Jurnalisme kita-kita.

---

Harvina, S. Sos adalah Tenaga Peneliti Pamong Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## “Hutagalung” dan Sibolga

Oleh: Essi Hermaliza

### Pendahuluan

Hutagalung, Tanjung, Siregar, Nasution, Lubis dan lain-lain adalah nama-nama marga yang tertera pada nama belakang sebagian masyarakat di Sumatera Utara. Marga merupakan identitas kekerabatan dalam keluarga yang dapat menunjukkan asal-usul keluarga.

Marga mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang di dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan kelembagaan dalam adat, sehingga seseorang tersebut dapat berperilaku dan bertutur dengan baik.

Marga muncul dalam suatu kelompok tertentu di mana setiap keturunan dalam kelompok itu menyandang marga yang sama. Dalam hal ini, marga yang digunakan mengikuti garis ayah atau dikenal dengan istilah *patrilineal*. Jadi marga yang boleh disandingkan pada nama akhir seseorang adalah marga yang sama dengan ayahnya.

Hutagalung adalah salah satu marga yang memiliki kelompok yang cukup besar di Sumatera Utara atau tepatnya di Kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatra Utara.

Wilayahnya seluas 3.356,60 ha yang terdiri dari 1.126,9 ha daratan Sumatera, 238,32 ha daratan kepulauan, dan 2.171,6 ha lautan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik dan Pulau Panjang. Secara geografis kawasan ini terletak di antara 1 42' - 1 46' LU dan 98 44' - 98 48 BT dengan batas-batas wilayah: Timur, Selatan, Utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Barat dengan Teluk Tapani Nauli.

Letak kota membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan menghadap Teluk Tapani Nauli. Sementara sungai-  
*Haba No. 49/2008*

sungai yang dimiliki, yakni Aek Doras, Sihopo-hopo, Aek Muara Baiyon dan Aek Horsik. Sementara wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari tiga kecamatan dan 16 kelurahan. Ketiga kecamatan itu yakni Kecamatan Sibolga Utara dengan empat kelurahan, Kecamatan Sibolga Kota dengan empat kelurahan, dan Kecamatan Sibolga Selatan dengan delapan kelurahan.<sup>1</sup>

Dari Sibolga ini lah marga Hutagalung berasal dan berkembang menjadi satu komunitas yang besar dan terpadang. Berikut ulasan tentang keberadaan komunitas Hutagalung di Sumatera Utara.

### Asal Muasal “Hutagalung”

Hutagalung merupakan salah satu marga tertua di Sibolga. Menurut seorang penulis sejarah Sibolga, Tengku Luckman Sinar, SH., seorang peneliti Belanda bernama EB Kielstra dalam salah satu penelitiannya menemukan bahwa sekitar tahun 1700 dari Negeri Silindung bernama **Tuanke Dorong Hutagalung** mendirikan Kerajaan Negeri Sibogah, yang berpusat di dekat Aek Doras. Dalam catatan EB Kielstra ditulis tentang Raja Sibolga: "Disamping Sungai Batang Tapanuli, masuk wilayah Raja Tapani Nauli berasal dari Toba, terdapat Sungai Batang Sibolga, di mana berdiamlah Raja Sibolga".<sup>2</sup>

Penetapan tahun 1700 itu diperkuat analisis tingkat keturunan yakni bahwa Marga Hutagalung yang telah berdiam di Sibolga sudah mencapai sembilan keturunan. Kalau jarak kelahiran antara seorang ayah dengan anak pertama adalah 33 tahun (angka

<sup>1</sup><http://www.wikipedia bahasa Indonesia. ensiklopedia bebas.htm>. diakses pada tanggal 16 September 2008.

<sup>2</sup>Kesultanan Sibolga, <http://sibolga.blogspot.com/2006/12/sultan-hutagalung.html> diakses pada tanggal 20 September 2008.



ini adalah rata-rata usia menikah menurut kebiasaan orang Batak) lalu dikalikan jumlah turunan yang sudah sembilan itu, itu berarti sama dengan 297 tahun. Maka kalau titik tolak perhitungan adalah tahun 1998, yaitu waktu diselenggarakannya Seminar Sehari Penetapan Hari Jadi Sibolga pada tanggal 12 Oktober 1998, itu berarti ditemukan angka 1701 tahun.<sup>3</sup>

### Gambaran Umum Kota Sibolga

Nama Sibolga berasal dari kata "Sibalgai" yang artinya kampung atau huta untuk orang yang tinggi besar. Konon katanya orang yang membuka Sibolga yang bermula di perkampungan Simaninggir bernama Ompu Datu Huringjom memiliki postur tubuh tinggi besar.<sup>4</sup> Adalah sebuah pantangan bagi masyarakat Batak untuk menyebut nama seseorang yang dituakan dan dihormati secara langsung maka untuk menyebut nama kampung yang dibuka oleh Ompu Datu Huringjom dipakailah sebutan "Sibalgai".

*Kota Sibolga* adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatra Utara. Wilayahnya seluas 3.356,60 ha yang terdiri dari 1.126,9 ha daratan Sumatera, 238,32 ha daratan kepulauan, dan 2.171,6 ha lautan. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik dan Pulau Panjang. Secara geografis kawasan ini terletak di antara 1 42' - 1 46' LU dan 98 44' - 98 48 BT dengan batas-batas wilayah: Timur, Selatan, Utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Barat dengan Teluk Tapani Nauli. Letak kota membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan menghadap Teluk Tapani Nauli.

Sementara wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari tiga kecamatan dan enam belas kelurahan. Ketiga kecamatan itu yakni Kecamatan Sibolga Utara dengan

empat kelurahan, Kecamatan Sibolga Kota dengan empat kelurahan, dan Kecamatan Sibolga Selatan dengan delapan kelurahan.<sup>5</sup>

Dilihat dari sudut pandang topografi, Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 0 - 150 meter, kemiringan (lereng) lahan bervariasi antara 0-2 persen sampai lebih dari 40 persen dengan rincian; kemiringan 0-2 persen mencapai kawasan seluas 3,12 kilometer persegi atau 29,10 persen meliputi daratan Sumatera seluas 2,17 kilometer persegi dan kepulauan 0,95 kilometer persegi; kemiringan 2-15 persen mencapai lahan seluas 0,91 kilometer persegi atau 8,49 persen yang meliputi daratan Sumatera seluas 0,73 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,18 kilometer persegi; kemiringan 15-40 persen meliputi lahan seluas 0,31 kilometer persegi atau 2,89 persen terdiri dari 0,10 kilometer persegi wilayah daratan Sumatera dan kepulauan 0,21 kilometer persegi; sementara kemiringan lebih dari 40 persen meliputi lahan seluas 6,31 kilometer persegi atau 59,51 persen terdiri dari lahan di daratan Sumatera seluas 5,90 kilometer persegi dan kepulauan seluas 0,53 kilometer persegi.<sup>6</sup>

Selain itu Kota Sibolga memiliki pelabuhan yang ramai disinggahi kapal-kapal dari dan menuju pulau Nias.

Potensi utama perekonomian masyarakat di Sibolga bersumber dari bidang perikanan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan industri maritim.

Jadi, keberadaan Sibolga di Provinsi Sumatra Utara bukanlah merupakan sebuah wilayah kecil. Akan tetapi adalah salah satu kabupaten yang keberadaannya memiliki peranan penting di bidang kelautan, baik di

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kota Sibolga, <http://www.wikipedia Indonesia.ensiklopedi bebas.com> diakses tanggal 1 September 2008.

<sup>6</sup> *Ibid.*

daerah pesisir maupun Sumatera Utara secara menyeluruh.

#### Sibolga di Masa Lalu

Kesultanan Sibolga berjaya sebagai pelabuhan dan gudang niaga untuk barang-barang hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, cengkeh, kemenyan dan rotan. Inggris bahkan pernah menjadikan Sibolga sebagai pelabuhan gudang niaga lada terbesar di Teluk Tapian Nauli.

Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, diperkirakan sejak tahun 1500 sudah terjadi hubungan dagang antara para penghuni Teluk Tapian Nauli dengan dunia luar yang paling jauh yakni negeri orang-orang Gujarat dan pendatang dari negeri asing lain seperti Mesir, Siam, Tiongkok. Para golongan terkemuka Tapian Nauli juga sudah dikenal di Mesopotamia, paling tidak melalui sejarah lisan yang dibawa saudagar Arab.

Tercatat pula bahwa pada tahun 1500 itu pelaut Portugis sudah hilir mudik di lautan dalam rangka mencari dan mengumpulkan rempah-rempah untuk dibawa ke Eropa.

Uang Portugis yang beredar di kalangan masyarakat yang berdiam di Teluk Tapian Nauli saat itu merupakan salah satu bukti. Ketika itu keberadaan Teluk Tapian Nauli sangat penting.

Selain sebagai pangkalan pengambilan garam, dusun ini terkenal juga sebagai pangkalan persinggahan perahu-perahu mancanegara guna mengambil air untuk keperluan pelayaran jauh.

Peranan Teluk Tapian Nauli sebagai pangkalan persinggahan dan pelabuhan dagang semakin dikukuhkan ketika Belanda dan Inggris memasuki wilayah itu di kemudian hari. Kapal Belanda di bawah pimpinan Gerard De Roij datang kepantai Barat Sumatera—Teluk Tapian Nauli—pada

1601. Sedangkan Inggris memasuki wilayah ini pada 1755.<sup>7</sup>

Kehadiran dan gerak langkah Belanda dan Inggris di Teluk Tapian Nauli dapat dilihat dari beberapa kronologi peristiwa berikut ini:

1604: Perjanjian antara Aceh dengan Belanda, yaitu antara Sultan Iskandar dengan Oliver.

1632: Kapal Belanda mulai berhadapan dengan Inggris di Pantai Barat Sumatera dalam rangka kepentingan dagang.

1667: Belanda mendirikan benteng (loji) di Padang.

1668: Belanda mulai dengan politik adu domba, menghasut Tiku dan Pariaman lepas dari Aceh. Barus pro Pagaruyung diusir dari berbagai tempat.

1669: Setelah berkuasa di Sumatera Barat, Belanda mulai mengincar pesisir Tapanuli dan mendirikan loji di Barus.

1670: Karena keserakahan Belanda (VOC) dengan praktek dagangnya yang monopolistik, pemberontakan di Barus terhadap Belanda tidak dapat dielakkan dan terus meningkat. Raja Bárus dibantu oleh adiknya Lela Wangsa berhasil mengusir Belanda dan menghancurkan loji Belanda.

1678: Belanda dapat membalas, namun pada ketika itu perang sengit antara Raja Barus dengan Belanda terus berkobar. Raja Barus melakukan taktik gerilya. Putera raja di Hulu berhasil membunuh dokter Belanda dan seorang serdadu Belanda. Namun Belanda berhasil menangkap Raja Iela Wangsa dan membuangnya ke Afrika Selatan.

1733: Belanda semakin merajalela dengan berhasilnya menangkap Raja Barus. Seterusnya bukan hanya Barus saja yang

<sup>7</sup>Kesultanan Sibolga, <http://sibolga.blogspot.com/2006/12/sultan-hutagalung.html> diakses pada tanggal 20 September 2008.

## Wacana

diserang, tapi Belanda juga menyerang Sorkam, Kolang dan Sibolga.

1734: Oleh karena Belanda telah melakukan penyerangan terhadap Raja-Raja yang ada di Teluk Tapian Nauli, maka Raja-Raja yang ada di Teluk Tapian Nauli mengkonsolidasikan diri, maka lahun ini terjadilah peperangan secara besar-besaran terhadap Belanda. Serangan datang dari Sibolga, Kolang, Sorkam dan Barus dipelopori anak Yang Dipertuan Agung Pagaruyung.

1735: Belanda terkejut dan kewalahan menghadapi peperangan ini. Belanda melakukan penelitian, dan ternyata diketahui bahwa semangat patriotisme yang dikobarkan dari Raja Sibolga itulah sumber kekuatan. Belanda ingin melampiasakan rasa penasarannya kepada Raja Sibolga, namun tidak berhasil. Antara 1755-1815 pesisir Pantai Barat Sumatera Utara, Teluk Tapian Nauli, berada di bawah pengaruh Inggris. Pada 1755 Inggris memasuki Tapian Nauli dan membuat benteng di Bukit Pulau Poncan Ketek (Kecil). Mereka mulai menguasai loji-loji Belanda dan markas Aceh yang berada di pesisir Barat Tapanuli.

1758: Pasukan Inggris mulai mengusir loji-loji Belanda dan juga markas Aceh dari pesisir barat Tapanuli. Silih berganti usir-mengusir antara Inggris dengan Belanda.

1761: Perancis meninggalkan Poncan. Kemudian Inggris datang bekerjasama dengan penduduk Tapian Nauli dan Sibolga.

1770: Karena suasana perdagangan mulai tenang, maka Inggris mendatangkan budak dari Afrika dan India untuk mengerjakan urusan dagang dan perkebunan Inggris. Kuria Tapian Nauli dan Raja Sibolga merasa keberatan atas tindak tanduk Inggris ini.

1771: Stains East Indian Company Inggris di Tapanuli dinaikkan menjadi "Residency Tappanooly".

1775: Karena dagang Inggris mulai menurun karena tidak mendapat simpati dari Kuria Tapian Nauli dan Raja Sibolga, maka Belanda mengambil kesempatan mengadakan perjanjian dagang dengan Kuria Tapian Nauli dan Raja Sibolga.

1780: Puncak perselisihan antara Belanda dengan Inggris adalah persoalan monopoli garam. Kesempatan ini dipergunakan oleh Aceh untuk menyerang Inggris di Teluk Tapian Nauli. Aceh untuk sementara dapat menduduki Teluk Tapian Nauli, akan tetapi Inggris meminta bantuan dari Natal dan Inggris kembali menduduki Tapian Nauli (Poncan Ketek).

1786: Aceh kembali menyerang Inggris di Tapian Nauli. Serangan ini tidak berhasil karena Inggris meminta bantuan ke Natal.

1801: Jhon Prince ditetapkan menjadi Residen Tapanuli berkedudukan di Poncan Ketek. Sejak saat itu Poncan Ketek mulai ramai didatangi oleh orang Cina, India, dan lain-lain.

1815: Residen Jhon Prince mengadakan kontrak perjanjian dengan Raja-Raja sekitar Teluk Tapian Nauli, termasuk Raja Sibolga. Perjanjian ini disebut "Perjanjian Poncan" atau "Perjanjian Batigo Badusanak".

1825: Inggris menyerahkan Poncan kepada Belanda, sebagai realisasi Traktat London 17 Maret 1824.

1850: Belanda mulai menata pemukiman di Sibolga dengan menimbun rawa-rawa dan membuat parit-parit.

1851: Penguahan Adat Pusaka di Teluk Tapian Nauli dan sekitarnya oleh Residen Tapanuli Conprus.<sup>8</sup>

### Hutagalung dan Perniagaan

Eksistensi Marga hutagalung sangat diperhitungkan di Sibolga. Bahkan Sibolga identik dengan marga Hutagalung tersebut.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Ketika pemerintah daerah menghitung usia Kota Sibolga dijelajahi dengan menghitung eksistensi marga Hutagalung tersebut yaitu dengan menganalisa silsilah keturunan Hutagalung di Sibolga.

Hutagalung adalah sekelompok warga yang cukup piawai dalam bidang perniagaan. Dalam kurun waktu 1513-1818, komunitas Hutagalung dengan karavan-karavan kuda menjadi komunitas pedagang penting yang menghubungkan Silindung, Humbang Hasundutan dan Pahae dengan Sibolga yang menjadi daerah pesisir tempat keluar masuk komoditas ke tanah Batak selain Barus.

Komoditas yang dibawa dari pedalaman tanah Batak adalah hasil hutan. Sementara komoditas yang mereka bawa ke tanah Batak adalah garam, tekstil, perhiasan aksesoris, dan lain-lain. Pada permulaan abad ke-12, seorang ahli geografi Arab, Idrisi, memberitakan mengenai ekspor kapur di Sumatera. Orang Batak yang menjadi produsen kapur menyebutnya *hapur* atau *todung* atau *haboruan*.<sup>9</sup> Selanjutnya warga Hutagalung yang menjadi perantara perniagaan dan mengirimnya melalui pelabuhan di Sibolga.

Para pedagang Hutagalung ini aktif menghadiri *onan-onan* yang menjadi pusat-pusat transaksi perdagangan di tanah Batak. Di setiap *onan* mereka mempunyai toko-toko untuk distribusi barang-barang sekaligus tempat pengumpul hasil hutan dari para petani. Alhasil pedagang Hutagalung menjadi makmur dengan tanah dan bangunan yang tersebar di mana-mana. Kelompok konglomerat Batak terbentuk melalui komunitas ini.

#### Agama

Komunitas Hutagalung adalah komunitas yang menganut Islam di Tanah Batak. Mereka menjadi komunitas Muslim Batak sudah sejak lama. Dapat dikatakan

Islam berkembang di Sumatera Utara berawal dari Sibolga. Letaknya yang berada di daerah pesisir dan mengandalkan perniagaan sebagai mata pencaharian membuat warganya mudah menerima pengaruh dari luar. Dalam hubungannya dengan pedagang dari negara lain, tidak pula terhindarkan banyak pengaruh yang masuk ke daerah ini

Menurut catatan sejarah, pada tahun 921 H atau tahun 1514 M telah didirikan Mesjid Syiah di kampung Hutagalung, Horian di Silindung. Komunitas Hutagalung yang menguasai alur perdagangan di teluk Sibolga, sampai ke daerah Silindung, Humbang dan Pahae ini, mendirikan banyak mesjid di Silindung.

Diyakini bahwa Aliran Syiah berkembang lebih pesat dari pada mazhab-mazhab *mainstream* Indonesia dan menjadi kepercayaan kebanyakan marga Hutagalung yang dipengaruhi oleh paham tasawuf *syattariyah* dan ajaran-ajaran yang menyerupai Syiah. Pada tahun 1285 M, ajaran Islam Syafi'i mulai masuk ke Sumatera khususnya wilayah sekitar Pase, Aceh. Dan berkembang pula hingga ke Sumatera Utara.<sup>10</sup>

Seorang tokoh Hutagalung yang terkenal dan terdokumentasi adalah Amir Hussin Hutagalung, bergelar Tuanku Saman lahir 1819 dan meninggal tahun 1837 yang semasa dengan Tuanku Rao; Faqih Amiruddin. Ayah dari Tuanku Saman adalah Khalifah Abdul Karim Hutagalung yang menjadi imam besar mesjid di Silindung. Namun pada tahap ini komunitas Hutagalung mulai meninggalkan praktek syiah dan beralih ke sunni seiring dengan redupnya pengaruh Syiah di Indonesia.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

### Penutup

Warga Hutagalung dikenal sebagai pedagang yang menguasai jalur-jalur penting perdagangan di tanah Batak. Komunitas Hutagalung juga dikenal sebagai komunitas maritim yang menguasai jalur pelayaran di pusat-pusat perekonomian nusantara saat itu. Mulai dari Sibolga, Malaka dan Riau.

Marga Hutagalung hanya sebagian kecil dari banyak marga dan komunitas lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Mereka terus eksis sampai sekarang.

Komunitas tersebut juga adalah komunitas perantau yang pandai mengadu nasib di negeri orang. Ada yang merantau sampai ke Negeri Jiran, Malaysia dan ada pula yang merantau hingga ke pulau Jawa. Jiwa masyarakat pesisir yang tangguh membuat mereka dapat bertahan. Sampai sekarang marga Hutagalung yang melekat di akhir nama seseorang tak hanya ada di Sibolga tapi ada pula di daerah lain, sehingga sering didengar oleh publik. Akan tetapi jika dilihat dari silsilah keturunan, maka pada akhirnya akan ditemukan bahwa mereka adalah para keturunan komunitas Hutagalung yang ada di Sibolga. Karena dari sinilah "Hutagalung" berasal.

---

Essi Hermaliza, Spd, I. adalah Tenaga Pengkajian pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Upaya Pelestarian Gondang Sabangunan

Oleh : Iskandar EP

### Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan beranekaragam budaya. Masing suku bangsa memiliki warisan budaya yang tidak ternilai harganya dan telah dikenal di seantero dunia. Namun beberapa tahun belakangan ini kebanggaan terhadap kekayaan keanekaragaman budaya cukup terusik dengan banyaknya kasus pengakuan dari pihak luar terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sebut saja sebagai contoh dibajaknya lagu Rasa Sayange dari Maluku sebagai suara latar website promosi pariwisata Malaysia (walaupun syairnya telah diganti sedemikian rupa), diakuinya tari Reog Ponorogo sebagai budaya Malaysia (walaupun telah berganti rupa baik nama maupun jalan cerita tari tersebut), dan terakhir adalah telah dipatenkannya motif kerajinan perak Bali oleh para pengusaha asing.

Kasus-kasus pengakuan budaya Indonesia oleh pihak asing tentunya menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat Indonesia. Ada yang marah dan melakukan unjuk rasa pada pihak terkait seperti kedutaan asing maupun lembaga pemerintahan seperti DPRD dan Gubernur. Ada pula yang menyalahkan lamban dan tidak tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut, dan tidak sedikit pula yang menganggap bahwa kasus pengakuan kekayaan budaya bangsa Indonesia oleh pihak luar terkait dengan tidak pedulinya bangsa ini terhadap budaya sendiri.

Adanya pendapat bahwa ketidakpedulian bangsa Indonesia terhadap budayanya sendiri terkait dengan makin

ditinggalkannya budaya asli Indonesia terutama oleh generasi muda. Masyarakat lebih bangga menggunakan budaya asing diberbagai sektor kehidupan masyarakat dibanding budaya asli Indonesia. Mulai dari makanan, permainan, hiburan sampai pola perilaku meniru budaya asing. Tidak mengherankan jika anak-anak sekarang lebih mengenal Dora, Sinchan, Power Ranger dibandingkan kancil, Timun mas.

Terjadinya ketidakpedulian kekayaan budaya bangsa, menurut Edi Sedyawati<sup>1</sup> hal ini terjadi karena, a. tidak pernah dipahami lagi teknik dan kaidah-kaidah estetikanya, b. semata-mata dianggap kuno atau tidak patut lagi, atau tidak ngetren, dan, c. sengaja dihindari karena asosiasinya dengan system kepercayaan lama yang dianggap tidak cocok lagi dengan tata kehidupan masa kini.

Untuk mencegah makin banyaknya kasus pengakuan pihak asing terhadap kekayaan budaya Indonesia diperlukan beberapa tindakan pencegahan, salah satunya yang terpenting adalah dengan melakukan pelestarian budaya.

Pelestarian merupakan upaya keseluruhan dalam rangka menjaga eksistensi suatu kebudayaan. Berdasarkan kalimat tersebut, maka yang dilestarikan adalah eksistensi kebudayaan tersebut dan bukan ungkapan-ungkapan yang menyertainya. Dengan demikian upaya pelestarian menjadi suatu usaha yang dinamis.

<sup>1</sup> Edi Sedyawati, "Pengertian-Pengertian Dasar: Sebuah Saran". *Makalah Semiloka Preservasi dan Konservasi Seni Budaya Nusantara*, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Yogyakarta, 11-13 Mei 2007. hlm. 2

Dalam pengertian pelestarian tercakup tiga rincian tindakan yaitu: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan kebudayaan merupakan segala upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan bagi manfaat dan keutuhan system gagasan, system perilaku, dan atau benda budaya akibat perbuatan manusia ataupun proses alam.

Termasuk kedalam upaya perlindungan ini adalah perlindungan terhadap kerusakan/kepunahan dan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak patut, tidak adil, atau tanpa hak (*mis appropriation*).

Pengembangan kebudayaan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujudan budaya, serta peningkatan mutu dengan memanfaatkan berbagai sumber dan potensi. Sedangkan pemanfaatan kebudayaan adalah upaya penggunaan perwujudan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan kebudayaan ini diperlukan suatu undang-undang yang melindungi kekayaan kebudayaan Indonesia khususnya terkait dengan "Pengetahuan tradisional" (traditional Knowledge) dan "ekspresi budaya tradisional /tradisi folklore (Traditional Cultural Expression/Expressions of Folklore).

Keduanya akan menjadi undang-undang *sui generis* untuk mendampingi Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sehingga tidak adalagi kasus kekayaan budaya Indonesia yang dapat dimiliki hak ciptanya oleh orang asing.<sup>2</sup>

Upaya pelestarian kebudayaan saat ini harus dipercepat dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sebagai kebiasaan suatu masyarakat yang bermanfaat untuk

mempertahankan dan mengembangkan cara hidupnya, maka kebudayaan harus membawa masyarakat kearah lebih sejahtera dan atau lebih bahagia.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kebiasaan manusia yang tercermin dalam pengetahuan, tindakan dan hasil karyanya sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya untuk mencapai kedamaian dan atau kesejahteraan hidupnya. Kebudayaan harus dapat menjadikan masyarakatnya lebih damai dan lebih sejahtera, bukan sebaliknya menjadi beban masyarakatnya. Oleh karena itu semua kebudayaan yang tidak bermanfaat untuk kedamaian (kebahagiaan) dan kesejahteraan manusia akan ditinggalkan.

Perubahan orientasi nilai budaya yang dimiliki masyarakat pendukungnya, menjadikan suatu kebudayaan semakin ditinggalkan masyarakat pendukungnya tersebut.

### Gondang Sabangunan

Dalam pengertian masyarakat luar, kata *gondang* diartikan sebagai kesenian gendang atau perkusi khas masyarakat Batak. Sedangkan menurut tradisi Batak, kata *gondang* memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuannya. *Gondang* dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik, ensambel musik, komposisi lagu<sup>3</sup> *Gondang* dapat juga diartikan sebagai (1) menunjukkan satu bagian dari kelompok kekerabatan, tingkat usia; atau orang-orang dalam tingkatan status sosial tertentu yang sedang menari (*manotor*) pada saat upacara berlangsung<sup>4</sup>

<sup>3</sup> A.Pasaribu, *Analisis Musik Indonesia*, (Jakarta, Pantja Simpati, 1987)

<sup>4</sup> Irwansyah Hutasuhat, "Analisis Komperatif bentuk (pengarapan) dan teknik permainan dari sebuah

<sup>2</sup> *Ibid*

Sebagai perangkat alat musik, gondang sering disebut sebagai gondang Batak. Menurut Irfan<sup>5</sup> *Gondang Batak* sering diidentikkan dengan *gondang sabangunan* atau *ogling sabangunan* dan kadang-kadang juga diidentikkan dengan *taganing* (salah satu alat musik yang terdapat di dalam *gondang sabangunan*). Dari pengertian itu, alat musik batak lain yang disebut *gondang hasapi* atau yang dikenal sebagai uning-uningan dianggap sebagai bukan *gondang Batak*. Padahal alat tersebut juga termasuk *gondang Batak*. *Gondang sabangunan* dan *gondang hasapi* digunakan dalam upacara yang berkaitan dengan religi, adat maupun upacara seremonial lainnya.

*Gondang sabangunan* yang oleh orang Batak juga disebut sebagai *parhohas na ualu* terdiri dari delapan jenis instrument tradisional Batak Toba yaitu :

#### 1. *Taganing*

Dari segi teknis, instrumen *taganing* memiliki tanggung jawab dalam penguasaan repertoar dan memainkan melodi bersama-sama dengan *sarune*. Walaupun tidak seluruh repetoar berfungsi sebagai pembawa melodi, namun pada setiap penyajian *gondang*, *taganing* berfungsi sebagai "pengaba" atau "dirigen" (pemain group *gondang*) dengan isyarat-isyarat ritme yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota ensambel dan pemberi semangat kepada pemain lainnya.

#### 2. *Gordang*

*Gordang* ini berfungsi sebagai instrumen ritme variabel, yaitu memainkan iringan musik lagu yang bervariasi.

---

Gondang (komposisi lagu) yang disajikan oleh tujuh partaganing", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Sastra Jurusan Etnomusikologi USU, 1990

<sup>5</sup> Irfan, Makna dan arti yang terdapat pada sistem peralatan *gondang* dan fase-fase dalam upacara kematian pada Batak Toba, <http://library.usu.ac.id/download/fe/Irfan.pdf>, 2004.

#### 3. *Sarune*

*Sarune* berfungsi sebagai alat untuk memainkan melodi lagu yang dibawakan oleh *taganing*.

#### 4. *Ogung Oloan* (pemiapin atau Yang Harus Dituruti)

*Ogung Oloan* mempunyai fungsi sebagai instrumen ritme konstan, yaitu memainkan iringan irama lagu dengan model yang tetap. Fungsi *agung oloan* ini umumnya sama dengan fungsi *agung ihutan*, *agung panggora* dan *agung doal* dan sedikit sekali perbedaannya. *agung doal* memperdengarkan bunyinya tepat di tengah-tengah dari dua pukulan *hesek* dan menimbulkan suatu efek *synekopis* nampaknya merupakan suatu ciri khas dari *gondang sabangunan*.

Fungsi dari *agung panggora* ditujukan pada dua bagian. Di satu bagian, ia berbunyi berbarengan dengan tiap pukulan yang kedua, sedang di bagian lain sekali ia berbunyi berbarengan dengan *agung ihutan* dan sekali lagi berbarengan dengan *agung oloan*. Oleh karena itu musik dari *gondang sabangunan* ini pada umumnya dimainkan dalam tempo yang cepat, maka para penari maupun pendengar hanya berpegang pada bunyi *agung oloan* dan *ihutan* saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka *ogling oloan* yang berbunyi lebih rendah itu berarti "pemimpin" atau "Yang harus di turuti", sedang *ogling ihutan* yang berbunyi lebih tinggi, itu "Yang menjawab" atau "Yang menuruti". Maka dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi yang berlangsung antara *ogling* dan *ihutan* dianggap oleh orang Batak Toba sebagai suatu permainan "tanya jawab"

#### 5. *Ogung Ihutan* atau *Ogung pangalusi* (Yang menjawab atau yang menuruti).

#### 6. *Ogling panggora* atau *Ogung Panonggahi* (Yang berseru atau yang membuat orang terkejut).

#### 7. *Ogung Doal* (Tidak mempunyai arti tertentu)



### 8. Hesek

*Hesek* ini berfungsi menuntun instrumen lain secara bersama-sama dimainkan. Tanpa *hesek*, permainan musik instrumen akan terasa kurang lengkap. Walaupun alat dan suaranya sederhana saja, namun peranannya penting dan menentukan.

Kedelapan instrument tradisional ini merupakan lambang dari delapan mata angin (desa *na ualu*) yang kemudian oleh para pemain *gondang sabangunan* kedelapan instrument tersebut disebut *Raja Na Ualu* (*Raja Nan Delapan*).<sup>6</sup>

Pada awalnya masing-masing instrument tersebut dimainkan oleh satu orang, namun karena perkembangan jaman dan semakin sulitnya mencari pemain, maka beberapa instrument dimainkan oleh seorang pemain musik seperti *ogling oloan* dan *ogling ihutan* dimainkan oleh seorang pemain. *Odap* sudah tidak digunakan lagi, kadang-kadang *hesek* juga dirangkap dimainkan oleh pemain *taganing*. Oleh sebab itu saat ini jumlah pemain *gondang sabangunan* bervariasi antar kelompok.

Para pemain *gondang sabangunan* oleh masyarakat Batak disebut *pargonsi*, sedangkan kegiatan memainkan musik *gondang sabangunan* itu sendiri disebut *margondang* (memainkan *gondang*).

Sebagai sebuah komposisi instrumen musik *gondang sabangunan* memiliki istilah yang berbeda-beda walaupun pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut masyarakat Batak (terutama kaum tua), *gondang sabangunan* dipercaya memiliki kekuatan supranatural.

Apabila dimainkan, maka suaranya akan kedengaran sampai ke langit dan semua penari yang mengikuti alunan suara *gondang sabangunan* tersebut akan melompat-lompat seperti kesurupan di atas tanah atau dalam

istilah orang batak disebut *na tondol di tano*. Sedangkan bagi pendengar lainnya suara yang keluar dari *gondang* dapat membuat perasaan mereka dimainkan dan terhanyut oleh suasana saat itu baik bersuka cita, sedih, dan merasa bersatu di dalam suasana kekeluargaan.

Adanya kepercayaan dari masyarakat Batak yang menganggap musik *gondang sabangunan* memiliki nilai yang sangat sakral, maka tidak mengherankan jika penghormatan mereka terhadap para pemusik *gondang sabangunan (pargonsi)* juga begitu tinggi. Para *pargonsi* dianggap memiliki ketrampilan khusus yang mereka dapat berdasarkan sabala dari *Mulajadi Na Bolon*. Selain itu juga para *pargonsi* dianggap mempunyai pengetahuan tentang *ruhut-ruhut ni adat* (aturan-aturan adat). Penghormatan masyarakat terhadap para *pargonsi* ini terlihat dari sebutan mereka terhadap para *pargonsi*. Para pemain *taganing* oleh masyarakat disebut dengan *Batara Guru Hundul* (Dewa Batara Guru yang duduk) dan *Batara Guru Manguntar* untuk pemain serune. Mereka berdua dianggap sejajar dengan dewa. Masyarakat percaya dengan perantara para *pargonsilah* melalui suara *gondang sabangunan*, pujian dan permohonan yang disampaikan pada *Mulajadi Na Bolon* dan para dewa bawahannya didengar.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, penghormatan masyarakat terhadap para *pargonsi* lambat laun mulai berkurang, terutama dengan hadirnya musik modern. Kelompok pemusik yang menggunakan alat-alat musik modern (Brass Band) lambat laun menggantikan kedudukan para *pargonsi*. Bahkan ada diantara masyarakat yang menyebut para pemusik modern tersebut dengan sebutan *pargonsi* walaupun berbeda nilainya.

<sup>6</sup> Ibid

Upaya Pelestarian Gondang Sabangunan

Seperti yang telah disebutkan di atas, pelestarian kekayaan budaya di Indonesia perlu segera dilakukan karena kita berlomba dengan perubahan yang ada di masyarakat. Kesenian musik *Gondang Sabangunan* harus bersaing dengan kehadiran alat musik modern yang lebih murah dan praktis. Selain itu juga eksistensi kesenian gondang sabangunan harus berpacu dengan semakin langkanya para *pargonsi*. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi *pargonsi* membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, yaitu :

1. Harus memiliki kepandaian khusus dalam memainkan alat music gondang sabangunan. Kepandaian ini bukan hanya didapat melalui belajar musik tetapi didapat karena bakat sejak dalam kandungan. Menurut masyarakat Batak Toba, para *pargonsi* harus mendapat sahala dari *Mulajadi Na Bolon* (Sang Pencipta) sejak ia berada dalam kandungan. Dengan kata lain para *pargonsi* adalah orang-orang pilihan *Mulajadi Na Bolon*.
2. Setelah seseorang diketahui mendapat Sahala dari *Mulajadi Na Bolon* (Sang pencipta), orang tersebut haruslah belajar dengan tekun terutama dari para *pargonsi* senior.
3. Selain pandai memainkan music, orang yang ingin menjadi *pargonsi* haruslah mempunyai pengetahuan tentang aturan-aturan adat ( *Ruhut-ruhut ni adat*). Mereka harus paham struktur adat masyarakat Batak Toba yakni *Dalihan Na Tolu* dan penerapannya di masyarakat.
4. Orang yang ingin menjadi *pargonsi* haruslah laki-laki, karena laki-laki merupakan hasil ciptaan dan pilihan pertama *Mulajadi Na Bolon* (Sang pencipta). Selain itu juga laki-laki

dianggap lebih bebas untuk dtang kemanapun diundang.

5. Orang yang menjadi *pargonsi* haruslah orang dewasa.

Dari persyaratan untuk menjadi *pargonsi* seperti yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa betapa susahnya untuk menjadi *pargonsi* terutama adanya syarat harus memiliki atau mendapat sahala dari *Mulajadi Na Bolon* (sang Pencipta) yang tentunya tidak semua orang mendapatkannya.

Langkah awal untuk melakukan pelestarian *Gondang Sabangunan* adalah dengan melakukan pendataan yang akurat melalui penelitian yang mendalam mengenai *Gondang Sabangunan*, baik makna dan nilai, pelaku atau pemain *Gondang sabangunan* yang masih ada sampai tingkat apresiasi masyarakat terhadap *gondang sabangunan*. Dengan adanya data yang akurat, maka rencana pelestarian dapat dilakukan seefektif mungkin, baik perlindungan, pengembangan maupun pemanfaatannya.

Perlindungan terhadap *gondang sabangunan* perlu dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui bantuan pembinaan/finansial terhadap kelompok-kelompok *pargonsi* gondang sabangunan sehingga mereka dapat bersaing dengan kelompok kesenian lainnya. Selain itu juga melakukan mendorong para pejabat pemda terutama yang berasal dari Batak Toba untuk memakai atau menggunakan *gondang sabangunan* dalam pelaksanaan upacara adat di keluarga/kerabat masing-masing.

Pengembangan terhadap *gondang sabangunan* perlu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kesenian tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan atau memasukan kesenian *gondang sabangunan* ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal.

## Wacana

---

Usaha ini tentunya akan bertentangan dengan persyaratan untuk menjadi *pargonsi* yang harus mendapat *Sahala* dari *Mulajadi Na Bolon* yang berarti pula menurunkan keskaralannya.

Untuk benturan tersebut pemma beserta masyarakat perlu memikirkan untuk membagi *Gondang Sabangunan* menjadi beberapa jenis sebagaimana yang dilakukan masyarakat Bali. Dalam mengembangkan keseniannya masyarakat Bali membagi keseniannya menjadi 3 (tiga) yaitu ; kesenian tradisional yang sangat sakral dan hanya dilaksanakan pada tempat dan saat tertentu saja, kesenian tradisional Bali yang telah mendapat sentuhan modern sehingga dapat dilaksanakan diberbagai tempat dan terakhir kesenian tradisional Bali yang telah dimodifikasi sesuai dengan tuntutan pasar pariwisata. Kesenian yang pada awalnya berlangsung selama dua jam, diringkas menjadi 30 menit untuk dipentaskan dihadapan wisatawan.

Dengan membagi *gondang sabangunan* menjadi beberapa jenis menjadikan keaslian *gondang sabangunan* tetap terpelihara dan disisi lain pelestarian dan pewarisan kesenian *gondang sabangunan* terus berjalan sehingga kesenian tersebut tetap eksis.

Pemanfaatan *gondang sabangunan* dapat diupayakan melalui jalur pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga pariwisata.

Pemanfaatan *gondang sabangunan* sebagai bagian dari atraksi budaya menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi daya tarik wisata dimana kesenian tersebut memiliki nilai keunikan tersendiri dan tidak ditemui di daerah lain.

### Penutup

Upaya pelestarian kekayaan budaya bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah tetapi juga tugas seluruh bangsa, karena kebudayaan merupakan penuntun masyarakat dalam berperilaku dan melaksanakan kehidupan. Usaha pelestarian kebudayaan sangat tergantung dari apresiasi masyarakat terhadap kesenian tersebut. Dengan adanya apresiasi yang tinggi terhadap kebudayaannya, maka dengan sendirinya upaya pelestarian kebudayaan akan mudah dilaksanakan. Sebaliknya semakin rendah apresiasi masyarakat terhadap kebudayaannya, maka semakin sulitlah usaha pelestarian kebudayaan tersebut. Dengan demikian usaha yang paling penting dalam upaya pelestarian suatu kebudayaan adalah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaannya dan ini tentunya merupakan usaha yang cukup berat.

---

Iskandar Eko Priyotomo, M.Hum adalah Peneliti pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Terjadi Dini Tinggiraja

Cerita ini berasal dari masyarakat Sumatera Utara yang mengisahkan tentang sebuah kerajaan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara mengenai lika-liku kehidupan dan persoalan yang terjadi dalam keseharian di kerajaan

Tinggiraja garanni dolok ai. Pardong ni Tinggi raja menurut penduduk sekitar ai, dong do turi-turian ni Tinggiraja wadup manjadi dolok na marapui janah harangan na ipelihara hinaan aima marasal humbani sada huta janah rakyat ni pe aman. Huta on ai ma sada harajaan na i perintah na marmarga "Purba Silangit", janah panak boru aima marmarga Damanik (boru Damanik) Parhuta ai mangharosuhon janah sonang hubani Raja, halani ia memerintah ibire anak dalahi pehon na boru ian jenges janah pistar. Sahalak boruni menjadi tarbarita, halani hajejengesan ni. Halani ai bahat ma raja-raja na sihot mambuat boru ai.

Bani sada ari Raja manuan omei (mar tidak). Haganupan parhuta margotongroyong Raja pe marpesta na banggal, bahat dayak sonai homa pinahan na legan i sayat baen panganan na marhorja. Raja pohon keluargani dihut mangawasi halak na marhorja. Tapi anak boru na jenges ai lang bere inang ni dihut hujuma, halani mabiar hajengesanni mambur mata ni ari. Anak boru na jenges ai mangindo dihut, tapi lang ibere mang ni.

"Sah irumah boru na majenges! Anggo ihut ho hali, hona abu ma!"

nini inang ni.

"Au mambalut ganup badanku!" nini boru ai

"Hali hona milas ni mata ni ari!"

"Hupakai pe tudongku, nang!"

mengulaki.

Marhiteon boru ai sada halak na bujur, hara nini ganup sura-sura ni ai Tangis ma ia. Oppung nina mangngar tangis ni hompu marhore. Oppung ai man dohori anak boru ai.

"Oppung, Oppung.....! lang ibere inang hujuma Dihut martidah" naima nini dampak oppungni on.

"Iya....anggo sonai sonaha uhurma baya....nini oppungni ai.

"Nani I oppugn dihut dau hujuma.....!"

"Iya anggo sanai baya, nara doho mangihutkon podahku.....? nini oppungni on.

"Rado, oppung.....!"

"Anggo sonai do baya buatma balangga in, tanggohan....."ihajahon hoppuni on matongan.

"Dinima, .....oppung.....!"

"Dumuma.....? Gonai nahkonma hubagas na matah, hubagas balangaan. Iya angga lomas ma holi patugah bakku, nini oppungni on. Jadi lomasma tongon idadah hoppuni on.

"Ya domma, oppung.....!"

"Ya, anggo domma baya lupatkonma hubagas in.....!"

Luppatma ia tongon hubagas ai, lomosma, salihma jadi Anduhur Salihma ia jadi anduhur, luppatma ia hulaman sonon. Jadi masulana ia hurumah bani direi sonin.

"Domma, oppung.....!" nini.

"Ya anggo domma deama ai. Jadi sonaha uhurmu.....?"

"Yang hujuma ma au da oppung. SONaha ma nikhu holi ijuma ai.....? Naha ma dodingku oppung.....?" Nini.

"Yan Sonon dodingmu baya"

"Naha oppung.....?"

"Turkukumba umba Bosurma man inang

Mangan.....uluni horbou

Turkukumba umba". Aima.....dopkonsi ijia ma sidea mamboge sorani anduhur on.

"Ai naha do parsonani anduhur an, ale.....! Naipes nalobih ma nada. An seng angga huboge soran parsorani anduhur".

"Ya baya.....?"

"Andina.....! Tangihon ham ge.....! Tangiham tikna rid a par sorani ai".

"Naha parsorani baya.....?"

"Turkukumba umba Bosurma man inang

Mangan uluni horbou

Turkukumba umba"

## Cerita Rakyat

"Ida.....! Nalobihama hape tongon da parsorani anduhur in.....! nini inangni on. Aima nai isuruh inangni on ma manaruhkon indahan hu huta. Mulakma namanaruhkon indahan on huhuta.

"Seng do tongon I huta boru ai dope. Atap na ija do ia ai"

"In.....! Naha lang....."

"Lang mada.....!"

Hape siboan idahan nakkan, itonga dalam I pangan sidea do anggo gulai pahon indahan nakkan gabe ompas pahan pamorah-morahan inisikkam namadp iberehkan bani oppung on. Malungun ma uhumni oppung on halani on. Jadi seng natarpangan oppung on nakkan gulei na itaruhkon ham juma on. Nahama parmanganni, juluma namatoras ma ia. Iberehkan sidoa do kakak-kakak anjaha gulei pe bahutan do pamorah marahanni sikkam. Ipangan oppung on ma tongon. Ipangan ya, kakak do ipangan bean domma au toras toras sonon. Ibagas ai nalungi huta, aima hu lopau. Ai dongdo lopou sapari ijai, anjaha sukkup do ijai parkakas gondrang. Jadi ipioi ma dakdanakon, ipoi....." Ya rado hanima manggual.....?" Nini dompak dakdanakon.

"Ra do, oppung.....!" nini dakdanakon

"Gonai bean hanimama.....!"

"sonaha ibaen, oppung, sorani Gondrangan.....?"

"Sononma baen hanima, sononma sorani gondrang nima baen hanima :

Hatilonglong

Hatilonglong

Hatilonglong

Songonai ma dakdanak mamlu gondang I lapou ai pakon sora songon na I hatahon oppung. Halakai mamalu.....mamalu pakon mamalu.....torus.....dob ai tarbege ma sora ni longgur, obbun tobal hutoruh mangihothom dolok ai.

"Takkap ma huting, ase hita buat ia manortor! Dob ai ompung songon na kesurupan manottorhon huting na dob I pasir-sir pakom" bulang-bulang ai. Dob ai mugur ma huta ai, songon na tarjadi suhul-suhul marsumbul ma Bah hambei tanoh.....marbomdar hu toruh ni jabuai. "Pung.....Pung! Bah.....Bah!" ihatahon

halaki. Tarher tarsonggot. "Iah, pahoppukku! Torusson ma!"

Sidea seng pala mabiar age aha alona oppung do manuru. Martabba ma bah hubei dolok ai. Bah ai milas janah boi mampatehom saganup na mamombursi. Dakdanak nongkan ai mulai ma hujai-hajom alani bah na milas ai. Songonai bah na milas ai torus marlittun halaki pakon na legan hu laut gantung I Tanoh Karo.

"Dob ai marubah ma kerajaan ai manjadi sada dolok merepi na jenges. Iatasna dong do bahat taridah kawah-kawah pakom mamburishkaon bah ma milas. I ujung taridah ope puing-puing kenangan na songon partandingan hambei peristiwa ai. Umpamani, ijai Rado i juppai bentuk ni tanoh na mirip/saupha pakom jabu bolon, dong do tanoh gempal na pittor sangan usung raksasa.

Selain manorih pemandangan na mengerihon, ijai pebahat do hita mandapothom bunga-bunga na marwarna-warna. Somaima manurut haporsayaon masyarakat i sekitar ni ai bunga-bunga ai aima pembuatan hambei inang-inangni Raja Purba Silangit. Inang-Inangi aima boru Saragih manjaddi bunga na bontar, Boru Sipayung marubah manjaddi bunga marwara ger-ger. Somai ma pakon inang-inangi na legan marubah menjadi warna na legan.

Anggo songonai, mamingon mambaen parsombahon umpamani: Songon sigaret, dong gunani seng pala hita mambaenbunga ai age pe hita mardalam mar odor-odor, songon na mardalam naparpudi Rado dapotsi, pakon manorih bunga ai taridah I lobei ni.

Bahat ope hal-hal na jenges i juppahi i jon. Umpamani, anggo hita mannonai dolok ai tikki sogot ni ari Rado hita manggar sarani na songon mandilo babi, dayok na songon i huta-huta hasa. Tikki bodari gati do tar tangak sora mamalu gondang.

Paima masuk hu harangan ni dolok ai, dong da sarat-sarat na maningon i turuti sagala na manorih. Anggo hira-hira juppah pakon ulok, ulang i hatahon "Ulok" tapi hatahonma "Andar", anggo marjumpa pakon

begu hatahonma “Oppung” halani domma dong natarjadi, anggo sahalak panorik marjuppa pakon sada ulok. Ia makkatahon “Ulok”, padahal halak na legan kawanni manorih ai sedo ulok hape na binatang melata lainnya, dophonsi das i jabu ia mengombushon hosa, humbani anak boru na tudu marmarga Damanik, sipayung pakon saragih.

I anjuhon as nanget-nanget. Naboru n marmarga songonon naboron aima inang-inang ni kopala ni raja i huta ai, maningon hata ni sidea gatih “mamparhatahon” maningon i baen do inang-inang ni.

Songonai ina tarjadi tinggi raja, pakon masyarakat haganupanni maningon, i piara daer anggo hita sihol mambuktihon matongon do ceritera ai tongon, Rado boi hita mambean parcobaan. Umpamani : hita mankkap sada huting pakon manarikni pakon mamalu gondang.

Rado udan pakon longgur maningon hutaruh. Hubani halak na marmarga Purba Silangit umpamani : Anggo mangiatkon gulai, asa, boi do borittan, kudis-kudisan pakon naborit na legan maol i tambari. Asas ai, nini aima anakni boru silangit na manjadi manuk-manuk.

Iannanni ai sonari maniadi Singanan na deár banitoris, pakon lokal agepe halak na lain. Bahad do homani halak nah an luar negeri manarih ianan pakon mardalam dalam pakon inanorih.

Sayang dalam hujan payah i dalani. (PR)

**Disadur dari Cerita Rakyat Daerah Sumatera Utara (Mite dan Legende), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1980/1981**



Dari  
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN  
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH

***Pariwisata : Pengetahuan, Perilaku, dan Sikap Masyarakat, Agus Budi Wibowo, dkk. 173 halaman, 2008.***

Pariwisata merupakan salah satu asset pemerintah yang begitu penting. Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan.

Buku *Pariwisata : Pengetahuan, Perilaku, dan Sikap Masyarakat* ini merupakan salah satu hasil penelitian peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, yang mencoba mengidentifikasi pengetahuan, sikap, kepercayaan dan perilaku masyarakat terhadap pariwisata di Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan mengambil kasus di Sabang, Aceh Besar, dan Banda Aceh, permasalahan mengenai pariwisata Aceh diurai secara luas dalam buku ini seperti potensi dan juga penghambat di dalamnya termasuk juga permasalahan utama yang diangkat dalam buku ini yaitu pengetahuan, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap pariwisata.

Bagi peminat masalah kepariwisataan atau masyarakat lainnya, buku ini sangat penting untuk dibaca sehingga memberi wawasan dan cara berpikir lebih luas dalam memahami dinamika pariwisata khususnya kepariwisataan di Nanggroe Aceh Darussalam . (As)

**BPNB ACEH**

Koleksi Perpustakaan



B P N B - 4 1 2 4